

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN PEMULA**



**MODEL-MODEL PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
ALUN-ALUN KOTA TERHADAP KEBIJAKAN PEMKOT MADIUN**

Tahun ke-1 dari rencana 1 tahun

Ketua : Drs. Abdul Malik,M.Pd/0022125503
Anggota : Drs. Agus Prasetya/005086310

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA
SEPTEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA

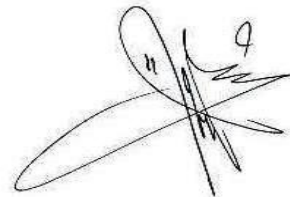
Judul Penelitian : MODEL-MODEL PERLAWANAN PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) DI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
(Studi tentang strategi PKL dalam mempertahankan hidup
di kawasan Alun-Alun Kota madiun)

Kode>Nama Rumpun Ilmu :
Ketua Penelitian
a. Nama : Drs. Abdul Malik, M.Pd
b. NIDN : 0022125503
c. Golongan/Jabatan : III/c/Penata
d. Jabatan,Fakultas : Lektor, FKIP-UT
e. Program Studi : PGSD
f. Alamat Surel(e-mail) : abdulmalik@ut.ac.id
Biaya Penelitian : Diusulkan ke Dikti Rp. 15.000.000,-

Surabaya. 29 Nopember 2013

Mengetahui,
Dekan FKIP-UT

Peneliti,



Drs. Udan Kusmawan,MA., Ph.D.
NIP. 19690405 199403 1 002

Drs. Abdul Malik, M.Pd
NIP. 19551222 198103 1 004

Mengetahu,
Ketua LPPM-UT

Dra. Dewi Artati Patmo Putri, MA., Ph.D
NIP. 19610724 198701 2 001

RINGKASAN

Problem utama di perkotaan adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan dari pedagang kaki lima (PKL). Semua kota di Indonesia dilematis dalam menghadapi para pedagang kaki lima (PKL). Berbagai upaya untuk mengatur pedagang selalu berakhir dengan konflik yang tidak terselesaikan. Gambaran negatif selalu dikaitkan dengan pedagang kaki lima (PKL) seperti kumuh, semrawut, kotor, Jorok, tidak teratur. Perlawanan pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan diekspresikan sebagai perwujudan adanya konflik kepentingan antara pedagang dengan pemkot Madiun dalam mengartikan kebijakan pemkot. Pemerintah kota Madiun berupaya menjalankan kebijakan dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan, keamanan, Kota Madiun. Sedangkan pedagang kaki lima (PKL) berkepentingan untuk dapat memenuhi dan mempertahankan hidup (*survival life*) dengan berjualan, berdagang di Alun-alun Kota Madiun, tanpa memperdulikan kepentingan pemkot. dalam menciptakan Kota Madiun sebagai Kota Adipura. Fenomena sosial model-model perlawanan ditunjukkan pedagang dalam penertiban pedagang kaki lima menjadi peristiwa dan berita menarik yang kita saksikan setiap hari baik yang persuasif lebih-lebih yang represif. Menurut paradigma sosiologi, fenomena sosial tentang pedagang kaki lima (PKL) dan permasalahannya khususnya konflik dengan pemkot Madiun, termasuk dimensi fakta sosial dengan kajian teori menggunakan teori konflik dan teori perlawanan, dengan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui observasi, dan *indepht intevieiw* atau wawancara mendalam untuk mengungkap “kotak hitam” masalah konflik sosial yang ada. Penelitian ini ingin mengungkap model-model perlawanan dan faktor-faktor penyebab terjadinya perlawanan pedagang kaki lima (PKL) dengan pemkot Madiun kaitannya terhadap penerapan kebijakan Pedagang kaki lima (PKL). Khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang dan jualan di kawasan Alun-alun Kota Madiun.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima (PKL), perlawanan, dan konflik

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkar limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan kemajuan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik moril maupun materiil. Untuk itu pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ketua Lembaga Penelitian universitas Terbuka
2. Dekan FKIP Universitas Terbuka
3. Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Surabaya
4. Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
7. Ketua Paguyuban pedagang kaki lima Kota Madiun
8. Perwakilan akademisi kota Madiun
9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kota Madiun
10. Teman-teman staf akademik UPBJJ-UT Surabaya

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisa laporan penelitian ini masih ada kekurangan, Untuk hal tersebut sumbang saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kajian Penelitian Terdahulu	20
1.3 Permasalahan Penelitian	40
1.4 Tujuan Penelitian	41
1.5 Manfaat Penelitian	42
1.6 Kerangka Pemikiran	42
2. Kajian Pustaka dan Teori	44
2.1 Kajian Pustaka	44
2.1.1 Konsep Pengertian Pedagang Kaki Lima	44
2.1.2 Hubungan Sektor Informal dengan sektor formal.....	53
2.2 Kajian Teori	57
2.2.1 Teori Perlawanan	57
2.2.2 Realitas Konflik di Masyarakat Perkotaan	65
2.2.3 Kelompok Konflik	75
2.2.4 Potensi Konflik Hubungan Pedagangan Kaki Lima (PKL) dengan Pemkot	80

2.2.5	Elemen Dasar Teori Konflik	82
3.	Metode Penelitian	85
3.1.	Paradigma, Jenis dan Pendekatan	85
3.2	Teknik Analisa Data	87
3.3	Jadwal Penelitian	91
	Daftar Pustaka	96
	Lampiran-Lampiran	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, 32 % orang miskin tinggal di wilayah perkotaan (Morrel, dkk 2008 :1). Sebagian penduduk miskin perkotaan bekerja pada sektor informal, yang pertumbuhannya sudah melebihi sektor formal (Manning and Roesad 2006). Sektor informal menjadi pilihan terakhir warga urban atau kota maupun tenaga kerja pedesaan yang tidak berpendidikan dan tidak berketrampilan yang tidak terserap di sektor formal (Bhowmik 2005; Noer Effendi 2005)

Para urban yang tidak berpendidikan dan tidak terampil terpaksa masuk ke sektor informal, dilaporkan pula oleh Sethurman dan Davis dalam penelitiannya di Ghana. Menurut Sethurman (1976), para urban yang tidak memiliki ketrampilan yang memadai terjun ke sektor informal disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal menyerap mereka. Demikian pula Davis, menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian tak terpisah dari sektor ekonomi informal. Sektor ekonomi informal ini tumbuh di negara-negara berkembang, termasuk Ghana karena pembangunan ekonomi yang direncanakan tidak menciptakan pekerjaan yang mencukupi untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Sepanjang tahun 1990- an, situasi ketenaga kerjaan di Indonesia tidak menguntungkan bagi pekerja. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja ke dalam pasar nasional (Suharto: 2008). Sektor Informal menjadi katup pengaman dalam menghadapi masalah angkatan kerja yang tidak terserap dan terlempar dari sektor formal sejak terjadinya krisis ekonomi (Ari : 2008:12). Krisis yang menghantam bangunan ekonomi Indonesia mengakibatkan jumlah pengangguran mencapai titik krisis. Hal ini terjadi karena selama krisis berlangsung, para pekerja sektor konstruksi, perdagangan, industri dan keuangan, banyak keluar atau meninggalkan pekerjaan, karena mereka di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau perusahaan tidak beroperasi lagi karena bangkrut dilikuidasi. (Noer Effendi : 2005).

Internasional Labour Organization (ILO:1998) memperkirakan bahwa sekitar 5,4 juta pekerja formal yang bergerak di bidang jasa, manufaktur dan konstruksi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai akibat dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Kondisi serupa terjadi di Thailand, krisis ekonomi yang melanda Thailand dan tingginya biaya hidup menyebabkan pedagang kaki lima(PKL) menjadi solusi bagi mereka yang menganggur dan yang terkena dampak krisis. (Niratthron :2006).

Kenaikkan harga barang dan jasa membuat para pengangguran dan mereka yang miskin sulit melakukan penyesuaian diri, apalagi untuk bertahan hidup tanpa penghasilan yang pasti. Solusinya adalah mereka masuk ke sektor informal agar dapat bertahan hidup. (Bhowmik 2005).

Selama krisis ekonomi tersebut, terbukti bahwa sektor informal tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat berkembang pesat sebagai sektor ekonomi selain sektor formal. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor permintaan dan faktor penawaran.

Dari sisi permintaan, krisis ekonomi mengakibatkan pendapatan riil rakyat menurun, sehingga terjadi pergeseran permintaan masyarakat dari barang-barang mewah ke barang-barang sederhana buatan sektor informal. Dari aspek penawaran, akibatnya banyak orang dikeluarkan (dipecat) dari pekerjaan di sektor formal selama krisis, ditambah lagi dengan sulitnya angkatan kerja baru mendapatkan pekerjaan tersebut, maka suplai tenaga kerja dan pengusaha ke sektor informal meningkat.

Relatif kuatnya daya tahan sektor informal selama krisis disebabkan pula oleh tingginya motivasi pengusaha kecil sektor tersebut mempertahankan usaha. Hal ini dapat dipahami, sebab bagi banyak pelaku ekonomi kalangan masyarakat golongan ekonomi lemah, sektor informal merupakan satu-satunya sumber penghasilan dan penghidupan mereka. Berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor formal, para pengusaha kecil sektor informal sangat adaptif menghadapi perubahan situasi dalam usaha mereka. Sementara itu, banyak pengusaha menengah keatas yang bangkrut dan tidak mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, banyak usaha kecil seperti warung, toko-toko kecil, rumah makan gulung tikar di kota Madiun.

Perkembangan sektor informal pedagang kaki lima (PKL) di kota Madiun berlangsung sangat cepat bagaikan jamur tumbuh di musim penghujan. Setiap hari muncul pedagang kaki lima (PKL) baru dari berbagai daerah di sekitar wilayah kota Madiun. Jalan protokol utama dipenuhi oleh pedagang kaki lima (PKL), sementara daya tampung pedagang kaki lima (PKL) di tempat strategis yang disediakan terbatas. Dengan demikian telah terjadi kelebihan jumlah pedagang kaki (PKL) lima yang beroperasi di Kota Madiun.

Kasus serupa terjadi pula di kota Surabaya, dalam berbenah membenahi kotanya untuk mendapatkan predikat kota yang mempunyai Inovasi Managemen Perkotaan (IPM) dari pemerintah pusat (surya : 2012: 9) Predikat tersebut diberikan atas keberhasilan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan menempatkan pedagang kaki lima (PKL) dengan menata pedagang kaki lima di sentra PKL. Pada tahun 2012 jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya meledak terdata dengan jumlah 12.015 (Dinkop UMKM 2012) dan menempati lokasi di 22 sentra pedagang kaki lima (PKL) di kota Surabaya.

Berlandaskan peraturan daerah (perda) No 17/ 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), kota surabaya menata diri untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan indah. Masalah sosial akibat pedagang kaki lima (PKL) selama ini menjadi bumerang bagi kota-kota untuk mendapatkan piala adipura, karena

sulitnya pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) secara maksimal, yang sering terjadi perlawanan oleh pedagang kaki lima (PKL).

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor informal di wilayah perkotaan Indonesia kembali menunjukkan pertumbuhan yang pesat termasuk Kota Madiun. Menurut para ahli, meningkatnya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor moderen dan industri dalam menyerap tenaga kerja baru di kota (Suyanto, B. 2006:3). Di pihak lain pertumbuhan angkatan kerja baru di kota-kota besar sebagai akibat langsung dari migrasi desa-kota jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Kondisi ini telah menambah jumlah pengangguran usia muda dan terdidik di kota-kota besar termasuk kota Madiun (B.Suyanto,2008:2)

Pada masa lalu, jalan protokol seperti jalan H.Agus Salim, jalan Diponegoro, jalan Cokro Aminoto bebas dari pedagang kaki lima (PKL), yang ada hanya beberapa pedagang dengan jenis makanan tertentu. Saat ini bila melihat sore hari, malam hari, jalan tersebut berjubel pedagang kaki lima (PKL) dengan tenda-tenda pedagang, warung-warung pedagang yang berjualan menjamur dalam jumlah banyak. Kehadiran mereka nyaris memakan jalan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan masyarakat untuk bersantai. Di jalan H.Agus Salim dan jalan Diponegoro terjadi kepadatan lalu lintas, karena pedagang menggelar dagangannya di bahu jalan, terutama berakibat pada kendaraan, sepeda motor pembeli yang memarkir kendaraan di jalan tersebut. Kondisi

tersebut jelas berdampak buruk bagi banyak pihak, baik lalu lintas, parkir kendaraan, dan pengamen yang memanfaatkan situasi untuk meraup rezki dan jasa keamanan. Pandangan buruk semakin kental ketika Kota Madiun mencanangkan wacana “ *Keep Madiun Clean*” atau ciptakan Madiun Kota bersih dalam upaya meraih kembali piala adipura. Untuk keperluan tersebut diperlukan lingkungan yang sehat bersih bebas dari kesemrawutan kesan kumuh, jorok, kotor, indah, tertib di kota Madiun.

Kondisi semrawut, kumuh, kotor, jorok, tidak sehat telah melekat pada Pedagang Kaki Lima (PKL) karena alat peraga, limbah sampah, cuci peralatan, yang digunakan untuk berjualan mayoritas tidak dibersihkan secara maksimal. Beberapa pedagang bahkan meninggalkan tempat jualan tanpa terlebih dahulu membersihkan lokasi jualan.

Hasil wawancara dengan pedagang di sekitar Alun-alun Kota Madiun membuktikan bahwa perilaku pedagang kaki lima (PKL) tersebut menyebabkan kenyamanan, keindahan, kebersihan Kota Madiun terganggu. Apalagi ditambah dengan keikutsertaan pengamen, tempat parkir kendaraan yang berjubel dipinggir jalan. Kondisi semrawut tersebut diperparah oleh parkir kendaraan pembeli dan pengamen di tempat jualan, dan pedagang memakan jalan yang cukup lebar, sehingga ruas jalan menjadi sempit, belum lagi para abang becak yang menunggu penumpang berkumpul disekitar jualan pedagang kaki lima. Gambaran diatas dapat terlihat di jalan Diponegoro, jalan H.Agus Salim, jalan Cokro Aminoto,

bundaran Jalan Serayu dan Alun-alun di Kota Madiun setiap hari terutama pada pagi, sore dan malam hari .

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Madiun tambah sulit ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat menurun, akibat terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar dunia dan banyaknya PHK di pabrik-pabrik yang berdampak pada perekonomian nasional. Dalam hal ini berakibat bertambahnya jumlah PKL terutama serbuan pedagang dari luar kota Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Ngawi, dan Kabupaten Madiun.

Pedagang Kaki Lima (PKL) dari luar Kota Madiun sulit dideteksi kartu tanda penduduk (KTP) nya, mereka langsung membawa peralatan dan langsung jualan. Alasan mereka klasik sekali yaitu bahwa menjadi pedagang kaki lima (PKL) karena sekedar mencari sesuap nasi karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Menurut mereka yang penting membayar uang kebersihan, dan keamanan yang dikenakan setiap berjualan yang disediakan oleh pemerintah Kota Madiun.

Melihat dampak yang demikian, pemerintah Kota Madiun berulang kali melakukan penertiban di seluruh jalan protokol terutama pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di Alun-alun Kota Madiun. Dan pada jalur padat lalu lintas yaitu Jalan Pahlawan, Jalan. H.Agus Salim, jalan Diponegoro, kompleks stadion Wilis dan Jalan Serayu setiap hari. Sebenarnya pemerintah Kota Madiun telah berupaya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan menata jam/lokasi jualan dengan

melakukan operasi ketertiban umum dengan membentuk TIM pengendali pedagang kaki lima (PKL).

Tim Pengendali PKL tersebut dengan anggota, Muspika, Dinas terkait, bagian sosial, Disperindag dengan komando polisi pamong praja. Pemerintah Kota Madiun meminta bantuan kepolisian, kodim, Koramil, Polsek, TNI angkatan udara Maospati, sebagai upaya menciptakan ketertiban, lingkungan bersih, sehat dan bebas dari kotor, kumuh, jorok. Untuk keperluan tersebut perlu penyuluhan bagi pedagang kaki lima (PKL) tentang lingkungan bersih, sehat, tertib dan aman, agar kebiasaan buruk dapat dicegah dan Kota Madiun menjadi kota sehat, sehat, tertib, aman.

Memasuki tahun 2013, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Madiun untuk menata lokasi dan jam jualan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menyikapi kehadiran pedagang kaki lima diberbagai jalan protokol, dan bangunan-bangunan liar yang dinilai semakin mengganggu keindahan, ketertiban, kebersihan kota, Pemerintah Kota membuat peraturan daerah (perda) tentang penataan jam dan lokasi jualan pedagang. Hal tersebut bertujuan untuk menata jam jualan dan ketertiban lokasi pedagang. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang *overload* dari berbagai daerah dan berjualan di tempat strategis di jalan -jalan kota Madiun sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Kehadiran sektor informal dari luar kota Madiun sudah seharusnya ditertibkan, dikurangi dan

dikendalikan, karena lokasi tempat jualan semakin sempit sedang jumlah pedagang kaki lima (PKL) semakin bertambah banyak.

Penataan, pendataan, penertiban, pengendalian pendatang sektor informal dari luar Kota Madiun sudah saatnya ditertibkan dengan adanya peraturan daerah (perda) tentang penataan jualan meliputi, jam dan lokasi berdagang. Pada tanggal 1 September 2012 wali kota melalui Ka. Disperindag mengeluarkan peraturan tentang penataan jam dan lokasi jualan di kawasan Alun-alun Kota. Dimana yang awalnya 3 *shift* waktu jualan kemudian dirubah menjadi 2 *shift* dengan pertimbangan mulai jam 00.00 sampai jam 12.00 digunakan untuk Dinas Kebersihan Kota (DKP). membersihkan Alun-alun Kota Madiun.

Dengan adanya penertiban untuk menegakkan perda tentang penataan jam dan lokasi jualan timbullah perlawanan para pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan pemkot Madiun. Akibat dari kebijakan penataan jam dan lokasi jualan mulai 10 September 2012 semua pedagang dilarang jualan pada jam 00.00 sampai 12.00 di Alun-alun Kota. Sejak saat itu perlawanan dilakukan secara terbuka, semi terbuka, dan secara tertutup oleh pedagang kaki lima (PKL). Untuk mengatasi perlawanan pedagang, setiap hari Tim penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang meliputi berbagai unsur, dinas terkait. Instansi tersebut meliputi unsur pemkot, Polres Madiun, Satpol PP, Kesbanglinmas Kota, Dinas Sosial sepakat untuk bekerja secara kolektif mulai 10 September 2012 untuk menertibkan, menata jam jualan pedagang di Alun-alun Kota Madiun.

Proses penertiban, penataan, relokasi, dengan mengedepankan pendekatan persuasif tidak represif. Langkah yang dijalankan pemerintah Kota Madiun untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dengan penertiban terpadu mencakup 4 kawasan. Kawasan tersebut antara lain: jalan Diponegoro, Jalan H.Agus Salim, Jalan Serayu (bunderan Serayu minggu pagi), Jalan Cokro Aminoto, Jalan Musi, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di kawasan Alun-alun Kota.

Beragam model-model perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) menyikapi penataan, penertiban terpadu Pemerintah Kota Madiun khususnya di kawasan Alun-alun Kota. Sebagian pedagang kaki lima (PKL) melakukan penolakan adanya penertiban, penataan tempat dan waktu jualan. Tetapi pada umumnya pedagang kaki lima tidak keberatan memenuhi harapan pemerintah Kota mentaati peraturan sesuai perda Pedagang kaki lima (PKL). Mengapa demikian, karena kebijakan tersebut dianggap mematikan rezki dan usaha mereka, dari awalnya 3 kali *shift* jualan hanya menjadi 2 kali *shift* jualan apalagi jumlah pedagang kaki lima (PKL) bertambah banyak saat ini.

Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan perang psikologis melawan pemerintah Kota Madiun dan mencari dukungan ke berbagai pihak agar penataan jam jualan/lokasi tidak memberatkan pedagang kaki lima (PKL). Di satu sisi pedagang kaki lima yang keberatan meminta agar penataan jam jualan dan lokasi tidak jauh dari tempat jualan mereka yang lama dan tidak hanya 2 *shift*. Karena menjadi pedagang Kaki

Lima (PKL) merupakan tulang punggung ekonomi keluarga dan hanya berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) menjadi harapan mencari nafkah. Apa artinya bila lokasi yang baru sepi pengunjung dan durasi waktu jualan pendek, jauh dari keramaian seperti di bekas lokasasi di Koci Nambangan Kidul Kec. Mangunharjo. Ada yang menggrudel sambil ngguyon “Tenang ae tetap dodolan biasane, mosok dodolan neng panggonan sepi, jam dodolane mung sithik, opo cucuk mas, lan sing tuku sopo, lamuk “ .

Model-model perlawanan Pedagang Kaki lima (PKL) di Alun-alun Kota terhadap penerapan peraturan daerah (perda) penataan pedagang antara lain (1) Melawan petugas Satpol PP, Kesbanglinmas (2) Berpindah lokasi jualan yang tidak jauh dari lokasi semula, (3) Ngrudel dalam hati dengan persaaan tidak normal, mengikuti aturan baru tetapi tidak ikhlas. Mereka mengatakan “ enak-enak neng kene lan iso dodolan terus kok kon pindah waah sepi, poo rame yoo “ . (4) Main kucing-kucingan dengan aparat pemkot, seperti yang terjadi di jalan Serayu (5) Meninggalkan rombongan, getobak, membiarkan warungnya apa adanya setelah selesai jualan.

Reaksi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kota tersebut dilakukan karena mereka mempunyai pemahaman bahwa tempat usahanya tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan selalu terjaga membayar iuran kebersihan, keamanan, listrik rutin/ *ajeg* tidak pernah nunggak. Karena alasan tersebut, pedagang kaki lima (PKL) tidak

merasa takut bahkan bila diusir dari lokasi yang strategis dan waktu jualan yang ada dikurangi menjadi dua *shift*. Maksud pemerintah adalah demi kepentingan bersama agar Kota Madiun menjadi bersih, sehat, indah, nyaman. Dalam hal ini para pedagang kaki lima (PKL) mempunyai pemahaman bahwa melalui penataan jam dan lokasi jualan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) karyawannya dapat membersihkan Alun-alun. sehingga kebersihan, keindahan , kesehatan lingkungan Alun-alun tetap terjaga.

Hakekatnya para pedagang tetap dapat berjualan seperti biasanya hanya waktu jualan yang dibatasi yang semula 24 jam penuh menjadi 18 jam, dari jam 12.00 sampai jam 24.000. Keberadaan mereka dengan peraturan baru, mereka maknai sebagai upaya pemkot membatasi mereka mencari rizqi. Padahal yang dilakukan pemerintah Kota sebagai upaya menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban. nuansa sehat bagi masyarakat. Mengingat Alun-alun Kota tidak hanya sebagai tempat untuk hiburan masyarakat, tetapi juga tempat untuk acara kenegaraan pemerintah Kota Madiun seperti upacara 17 an, 5 Oktober hari ABRI dan untuk rekreasi keluarga.

Dalam penelitian ini dikemukakan model-model gerakan perlawanan rakyat kecil di Amerika Latin dan di Indonesia untuk melihat mengapa rakyat kecil berani melakukan perlawanan dan apa bentuk-bentuk perlawanan mereka. Di Amerika Latin terdapat banyak gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat bawah. Model-

model gerakan perlawanan di Mexico, Bolivia, Argentina, Brazil, dan di tempat lainnya, memberikan kontribusi bahwa pada tahun 2001 meledak aksi nasional memberikan kontribusi positif terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, bahkan beberapa diantaranya berhasil mengantarkan pemimpin gerakan menjadi pemimpin pemerintah.

Di Argentina terdapat gerakan buruh yang sangat terkenal yaitu Gerakan buruh Pengangguran Kota Argentina (GPP). Petras (2005) melaporkan bahwa pada tahun 2001 meledak aksi nasional buruh pengangguran yang amat teorganisir, lebih dari 100.000 orang menyusuri 300 jalan raya di seluruh Argentina. Para buruh pengangguran berhasil mengorganisir pendudukan atas jalan raya di seluruh kota Argentina.

Aksi ini berhasil, karena adanya dukungan dan kerjasama dengan berbagai serikat buruh sektoral. Aksi yang dilakukan buruh pengangguran ini diikuti pula oleh berbagai komunitas penduduk dan kelas sosial, seperti pedagang lokal, pegawai pemerintah daerah, pegawai rumah sakit, guru, pensiunan, dan kelompok-kelompok Hak Azasi Manusia (HAM). Model-model perlawanan yang ditunjukkan buruh pengangguran dalam aksinya menentang pemerintah bervariasi, mulai dari pemogokan, pernyataan sikap, demonstrasi, pendudukan, blokade jalan, dan protes. Perlawanan yang dilakukan buruh pengangguran disebabkan karena kebijaksanaan pemerintah yang bercorak *neo liberal* yang ditandai oleh swastanisasi dan PHK besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya pengangguran buruh (Petras 2005).

Model gerakan perlawanan lain di Amerika Latin yang memiliki kisah sukses serupa di Argentina adalah gerakan petani tanpa tanah di Brazil atau *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* atau *Landless Workers Movement*, disingkat MST (Wilson: 2005 Wolford 2005). Cita-cita utama dari MST adalah : (1) Petani berjuang untuk reformasi agraria yang mendistribusikan tanah kepada petani yang akan menggarapnya. (2) menciptakan pembangunan masyarakat yang adil dan setara (Wolford 2005). Gerakan perjuangan MST mendapatkan dukungan luas dari berbagai gerakan dan jaringan HAM, agama, dan serikat buruh.

Kemiskinan dan kelaparan di desa-desa dan kota-kota di Brazil, merupakan penyebab utama mengapa MST berjuang melawan pemerintah. Kemiskinan penduduk desa dan kota tersebut, utamanya disebabkan oleh kepemilikan tanah yang timpang antara kelompok orang kaya dan kelompok masyarakat miskin. Sebagaimana dilaporkan oleh Wilson (2005) kelompok petani kecil yang jumlahnya 30,34% dari seluruh petani Brazil hanya penguasai 1,5% dari seluruh tanah pertanian yang ada di Brazil. Sedangkan petani kaya atau *kapitalis* yang jumlahnya hanya 1,6 % dari jumlah petani Brazil menguasai 53,2 % dari seluruh tanah pertanian di Brazil tersebut. Penguasaan tanah yang timpang ini diperparah lagi dengan tidak diolahnya tanah para petani kaya seluas 42,6 %. Diantara pemilik tanah dengan luas 1000 Ha ke atas, 88,7 % areanya tidak dimanfaatkan. Tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dilerantarkan tersebut memicu kemiskinan dan kelaparan di Brazil.

Terbentuknya MST disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) Krisis ekonomi pada akhir tahun 1970-an yang mengantarkan pada akhir kejayaan industri di Brazil, (2) perubahan orientasi dalam gereja katolik, dengan meluasnya teologi pembebasan, berkembang gereja basis dan hadirnya para uskup, romo dan suster *progresif*, (3) Meningkatnya iklim perlawanan menentang kediktatoran pada akhir tahun 1970-an.

Gerakan perlawanan MST dimulai dengan aksi pendudukan tanah di Brazil di daerah selatan, utara, dan timur laut sepanjang tahun 1978 hingga 1983. Semua gerakan dilakukan secara terencana dan diorganisir oleh aktivis di tingkat lokal. Aliansi yang dilakukan oleh MST dengan kelompok buruh, gereja, asosiasi jurnalis Brazil dan Partai Buruh Brazil, berhasil mengorganisasi 151.427 keluarga kaum tak bertanah, dan mengambil alih tanah seluas 21 juta hektar (Wilson : 2005).

Menjelang tahun 1990-an, MST telah memiliki cabang organisasi di 23 negara bagian, dan sejak tahun 1984 MST beranggotakan 250.000 keluarga di 1600 lokasi pemukiman. Jaringan sosial yang dibangun MST dengan berbagai elemen masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan gerakan perlawanan MST.

Tidak seperti model-model perlawanan biasa, MST di Brazil bukan sekedar gerakan perlawanan yang begitu tujuan tercapai, mereka lalu bubar. MST membangun model ekonomi pedesaan di Brazil dengan berbagai cara antara lain : (1) melakukan reformasi, (2) mengusahakan jaminan pangan bagi rakyat, (3) memperkuat pertanian keluarga, (4)

mempromosikan koperasi agroindustri, (5) meningkatkan standar kehidupan, (6) membuka lapangan kerja, (7) meningkatkan akses atas pendidikan dasar, (8) membangun kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup, (9) pengolahan tanah semi-kering, (10) pengembangan sektor agrikultur publik, (11) pengembangan model teknologi baru, dan (12) mendukung industrialisasi padat karya. (Wilson : 2005).

Di Indonesia model gerakan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan yang dapat perlindungan dari pemerintah cukup banyak. Dalam penelitian ini diambil contoh yaitu gerakan perlawanan yang dimuat media massa, yaitu gerakan perlawanan masyarakat menentang pabrik gula Kanigoro pada tahun 2000 di Kota Madiun dan gerakan perlawanan karyawan Freeport Timika pada tahun 2010.

Gerakan masyarakat melawan PG Kanigoro Kota Madiun, terjadi pada tahun 2000-an. PG kanigoro merupakan pabrik gula buatan Belanda yang dibangun pada tahun 1894 dan telah berumur lebih satu abad. Pabrik gula tersebut merupakan pemasok gula di kawasan Jawa Timur bagian barat. Untuk penyediaan bahan baku, lahan mengambil dan menyewa tanah penduduk di sekitarnya. Karena usia sudah tua dan tidak ada renovasi mesin-mesin pengolahan yang sudah berusia puluhan tahun pabrik gula tersebut menimbulkan dampak lingkungan yang tidak baik, terutama limbah dan polusi yang ditimbulkan oleh pabrik gula Kanigoro.

Sedangkan dampak ekonominya untuk masyarakat sekitar relatif rendah, karena pabrik tersebut relatif sudah tidak ramai seperti dulu.

Dampak polusi pabrik gula Kanigoro, utamanya di Kecamatan Taman Kota Madiun adalah seperti, polusi udara, limbah cair, padat dan gas yang mencemari tanah, air dan udara penduduk Kecamatan Taman terutama desa yang terdekat yaitu Banjarejo, Mojorejo, dan Taman. Menurut Dinas Kesehatan Kota Madiun (BPS: 2000)dampak seriusnya adalah: (1) Gangguan kesehatan pada masyarakat karena polusi udara dan limbah cair, (2) Meninggalnya penduduk karena gangguan kesehatan, (3) Pro dan Kontra keberadaan pabrik gula sehingga menimbulkan konflik horizontal, (4) Kerusakan tanah, sawah karena limbah air dari pabrik gula, dan (5) kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Perlawanan terhadap PG Kanigoro tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berdekatan dengan pabrik, tetapi seluruh warga Kota Madiun menolak keberadaan pabrik gula tua tersebut. Gerakan perlawanan masyarakat di Kecamatan Taman Kota Madiun memperoleh dukungan dari berbagai unsur dalam masyarakat seperti LSM, MUI, akademisi, pemerhati lingkungan, baik tingkat lokal maupun tingkat regional maupun nasional.

Atas dukungan dari berbagai pihak, masyarakat mengajukan tuntutan agar pabrik gula tersebut ditutup, karena eksistensinya mengganggu kesehatan dan kurang menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Akhirnya pada tahun 2003 pabrik gula Kanigoro

ditutup dan karyawan bagian produksi dipindah di pabrik gula terdekat yaitu PG. Pagotan Kabupaten Madiun yang berjarak hanya sekitar 25 Km dari PG Kanigoro.

Selain ditempuh dengan strategi pengembangan komunitas, PG gula juga melakukan intimidasi, provokasi kepada masyarakat yang menolak penutupan pabrik gula, guna melumpuhkan gerakan perlawanan rakyat. Aksi teror, ancaman, dilakukan terhadap penduduk yang menolak terhadap eksisnya PG Kanigoro, dengan menyebar orang untuk merayu penduduk agar tidak menolak keberadaan pabrik gula tersebut.

Gerakan perlawanan lain adalah perlawanan buruh di Freeport Timika Papua, yang dilakukan oleh pekerja lokal sebagai buruh di tambang baja terbesar di dunia tersebut. Perlawanan karyawan lokal di Free port telah mendapat sorotan dari *publik* dan mass media yang telah memakan korban. Pemicu utama adalah perlakuan *diskriminatif* karyawan lokal dan karyawan asing di Freeport terhadap upah yang didapat oleh mereka.

Gerakan perlawanan buruh Freeport di Timika yang dilakukan oleh karyawan lokal Papua terhadap manajemen Free port Tbk. Hal tersebut di sebabkan oleh kekecewaan karyawan lokal terhadap upah yang mereka lebih rendah diterima dibanding dengan karyawan asing yang berasal dari luar Papua. Model-model perlawanan dilakukan dengan ancaman menutup pabrik dan mengancam pemogokan massal. Tetapi perlawanan karyawan lokal dihadapi oleh manajemen dengan tindakan

represif. Namun demikian pihak manajemen mendengar dan menampung aspirasi karyawan lokal walau tidak terpenuhi sesuai standar yang diterima oleh karyawan asing yang bekerja di PT Freport Tbk.

Gerakan perlawanan wong cilik juga dilakukan oleh para pedagang kecil dengan cara atau model perlawanan yang berbeda dengan strategi gerakan yang dilakukan buruh dan petani yang diakhiri kekerasan berhadapan dengan aparat negara. Tidak jarang kekerasan aparat menimbulkan korban sebagai contoh kasus sengketa lahan antara penduduk Mesuji Lampung dengan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI). Peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2011 dimana telah menewaskan 6 orang warga lainnya karena luka tembak. Konflik dan kekerasan masih berlanjut dengan perlawanan lebih keras lagi dari pihak penduduk yang mengakibatkan 3 orang terbunuh dari pihak PT BSMI (Anonim : 13).

Gerakan perlawanan pedagang kecil sering kali diakhiri dengan tindakan kekerasan oleh aparat seperti kasus penanganan demonstrasi buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR). Sebagai contoh kasus-kasus penggusuran, pengusiran, pemaksaan pindah lokasi Pedagang Kaki Lima oleh satpol PP sering berakhir dengan bentrokan dan konflik terbuka. Menurut Alisyahbana dalam penelitiannya tentang "Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan di Surabaya".(2006) menyimpulkan bahwa model penataan dan penanganan pedagang kaki

lima semakin represif, maka semakin keras pula perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) dan buruh-buruh pabrik.

Model-model perlawanan pedagang kaki lima (PKL) meliputi tiga kategori :

Pertama, model perlawanan yang dilakukan untuk menolak lahirnya peraturan daerah, dilakukan dengan melakukan demonstrasi, meminta izin secara paksa kepada camat serta mencari dukungan LSM, mahasiswa serta membentuk paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL), serikat buruh.

Kedua, model perlawanan terhadap program relokasi dengan membentuk paguyuban, serikat buruh, dan mencari dukungan lembaga sosial masyarakat (LSM) dan mahasiswa untuk membantu gerakan protes pedagang dan buruh.

Ketiga, model-model gerakan perlawanan terhadap pengusuran dilakukan dengan adu mulut, memblokir jalan, mengintimidasi aparat, demonstrasi, merusak fasilitas umum yang ada, merusak taman kota, dan demonstrasi.

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh wong cilik, apakah mereka buruh tani, pedagang kaki lima, buruh pabrik semua dilakukan berkaitan dengan persoalan hidup dan penghidupan. Andaikata mereka sudah memiliki pekerjaan yang cukup menghidupi mereka, pedagang, buruh, tersebut tidak akan melawan aparat. Keberanian mereka melakukan

perlawanan, didukung oleh organisasi atau lembaga yang memiliki *motivation power* untuk melakukan perlawanan.

Berkaitan dengan kasus perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kota, apakah yang menjadi penyebab PKL melakukan perlawanan. Apakah aksi mereka merupakan strategi untuk hidup sebagai pedagang kaki lima (PKL), atau sebagai gambaran protes orang kecil yang susah hidup ditengah pembangunan kota. Jika hal tersebut merupakan model perlawanan /resistensi orang kecil, faktor apa yang penyebab mereka berani melakukan perlawanan. Problematika inilah yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Sebelum uraian ini masuk pada apa yang mejadi permasalahan dan tujuan penelitian serta untuk menguatkan argumen bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti. Berikut ini peneliti kemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Atau setidaknya mendukung perlunya sebuah penelitian yang memotret kehidupan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kota Madiun.

Pengungkapan penelitian sebelumnya, dimaksudkan :

- (1) Mengkaji mengapa penelitian ini perlu dilakukan.
- (2) Untuk menentukan posisi atau memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan layak untuk diteliti.

1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang memotret permasalahan, eksistensi dan masa depan sektor informal dan pedagang kaki lima (PKL). Dalam bagian ini akan ditampilkan beberapa penelitian yang relevan dengan eksistensi sektor informal, utamanya di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan sosial utamanya konflik sosial dan aspek sosial politik. Kaitannya dengan model-model perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah daerah, meskipun data penelitian tentang perlawanan PKL tersebut tidak banyak.

Hamidjojo (2004) dalam penelitiannya berjudul “ Analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penataan, pembinaan, dan penertiban PKL di Surakarta. Menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam penataan, pembinaan, dan penertiban adalah kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana menyumbang 66.22 %. Dari kontribusi tersebut *variable* kondisi lingkungan sosial ekonomi *variable* lingkungan menyumbang 16,68 % dan *variable* komunikasi sosial menyumbang 35.13% dan *variable* pelaksana memberi kontribusi sebesar 14,41 %. Dari ketiga fakta tersebut komunikasi sosial memberikan sumbangan yang paling besar yaitu 35.13 %.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah berkenaan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima/PKL tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat pelaksana saja, tetapi perlu mengundang PKL misalnya dengan memahami bersama perda yang

mengatur tentang PKL dan berdialog secara intensif dengan mereka. Sehingga kebijakan penataan dan pembinaan PKL dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti, penelitian Hamidjojo ini baru terbatas pada upaya melihat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penataan, pembinaan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Hasilnya ditemukan bahwa kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana yang menjadi faktor bagi penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Hamidjojo dalam penelitiannya sama sekali tidak melihat konflik sosial sebagai *variable* yang turut menentukan terjadinya perlawanan pedagang kaki lima (KL). Sedang disertasi ini menganalisis konflik sebagai faktor penguat perlawanan atau *resistensi* terhadap kebijakan publik yang dibuat Pemkot Madiun.

Wijayanti (2009) dalam penelitiannya tentang “ Out Come Kebijakan Pasca Relokasi Pedagang kaki lima (PKL) Banjarsari ke Notoharjo Kota Surakarta” menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :*Pertama*, proses relokasi PKL Banjarsari ke Notoharjo dilakukan melalui 3 tiga tahap yaitu, sosialisasi, penyiapan, tempat relokasi dan relokasi itu sendiri. *Kedua*, dampak yang ditimbulkan dari relokasi tersebut adalah : (1) PKL memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kepastian berusaha (bekerja) dan beralih status nya dari PKL tidak resmi menjadi mejadi PKL resmi, yang tidak lagi cemas mengalami penertiban, dan pengusuran dari Satpol PP. (2) Pemerintah memperoleh hasilnya dengan berkurangnya beban menangani PKL Banjarsari, serta semakin

rapi, tertib, dan indahnya wilayah monumen Banjarsari yang selama ini ditempati PKL.(3) Berpindahnya pedagang kaki lima (PKL) ke pasar Notoharjo meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Semanggi yang dahulu masih sepi dan meningkatkan peluang usaha yang lebih baik dengan menyerap tenaga kerja di pasar Notoharjo dan wilayah sekitarnya.

Penelitian Wijayanti tersebut baru mencermati proses relokasi PKL Banjarsari ke pasar Notoharjo dan dampaknya terhadap status PKL, beban pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Wijayanti fokus pada hal-hal positif dari Pedagang kaki lima (PKL). Wijayanti memotret relokasi PKL di Solo begitu mudah, tidak seperti halnya penelitian disertasi ini yang lebih memotret konflik Pedagang kaki lima (PKL) terhadap peraturan daerah (perda) penataan PKL dianggap sebagai penyebab konflik Pedagang kaki lima (PKL) dengan satpol Polisi Pamong Praja.

Maryuni (2007) dalam penelitiannya berjudul “ Alternatif Kebijakan terhadap Sektor Informal di Kota Pontianak “ Sri Maryuni mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Kota Pontianak, telah membuat kebijakan dalam menata dan membina pedagang kaki lima /PKL. Kebijakan yang telah ditempuh meliputi (1) Kebijakan struktural (2) Kebijakan edukatif (3) Kebijakan Relokasi.

Wujud dari kebijakan struktural yaitu adanya ketentuan tempat yang jelas bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Pontianak Nomor 217 tahun 2000 tentang

penunjukkan lokasi pedagang kaki lima di kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Selatan. Penentuan lokasi tersebut untuk berjualan PKL diperkuat oleh pengumuman dari Walikota Pontianak Nomor 6 tahun 2001 tentang larangan membangun tanpa izin dan berjualan di tempat tempat terlarang. Keputusan dan Pengumuman Walikota tersebut merupakan jabaran dari peraturan daerah (perda) Nomor 3 Tahun 1990 tentang penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum.

Dalam hal kebijakan relokasi, pemerintah Pontianak telah membangun pasar tradisional, yaitu pasar Dahlia dan pasar Mawar. Sebelum menjadi tempat relokasi, dahulu tempat tersebut terkesan kotor, kumuh, membuat jalan macet dan tingkat kecelakaan tinggi. Namun setelah pasar dibangun dan para Pedagang kaki lima (PKL) mulai menempati kios yang disediakan, lokasi menjadi rapi, bersih dan tingkat kecelakaan lalu lintas makin menurun.

Dalam rangka mendukung dua kebijakan diatas pemerintah Kota Pontianak telah membuat kebijakan edukatif dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada PKL, baik dalam manajemen maupun dalam bantuan permodalan. Dalam implementasi kebijakan tersebut, pemerintah Kota Pontianak bukannya tidak merespon perlawanan dari pedagang kaki lima. Perlawanan yang dilakukan PKL menurut Muryani(2007) berupa perlawanan yang dikembangkan untuk menolak lahirnya perda, perlawanan terhadap program relokasi, dan pengusuran.

Implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL tersebut memberikan dampak terhadap PKL, pemerintah dan masyarakat. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) kebijakan penataan dan pembinaan PKL berdampak pada penurunan pendapatan mereka karena situasi yang tidak menentu. Bagi pemerintah kebijakan penataan dan pembinaan PKL membuat daerah yang semula ditempati PKL menjadi lebih tertib, indah, dan aman. Bagi masyarakat umum kebijakan pemerintah Kota tersebut memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati keindahan dan kebersihan kota serta terhindar dari kemacetan. Bagi pengguna jasa Pedagang Kaki Lima (PKL), timbul dampak negatif yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari.

Agar kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) efektif dan efisien, Maryuni (2007) menyarankan perlunya menggunakan pendekatan *society participatory development*. Dalam pendekatan ini, Pedagang Kaki Lima (PKL) dilibatkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah kota, termasuk kebijakan relokasi.

Harapan, suara, keluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) hendaknya didengar dan ditindak lanjuti, serta kebijakan penertiban yang selama ini dilakukan represif, perlu diganti dengan kebijakan yang bersifat persuasif tanpa kekerasan. Untuk melakukan antisipasi perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), disarankan agar pemerintah kota

menggunakan pendekatan *empowerment*. Dengan cara bertindak persuasif dan lebih banyak menempuh cara-cara edukatif dalam membina PKL.

Penelitian Maryuni hampir mirip dengan penelitian ini, bedanya penelitian ini membahas konflik yang terjadi berkaitan dengan penerapan perda penataan PKL. Maryuni menemukan adanya perlawanan yang dilakukan PKL terhadap kebijakan yang diambil pemkot Pontianak. Penelitian disertasi ini berbeda dengan hasil penelitian Maryuni, karena penelitian disertasi ini membahas konflik sosial terhadap penolakan isi perda penataan PKL di kawasan Alun-alun kota. dan konflik penataan yang tidak dilihat Maryuni dalam penelitiannya.

Dalam penelitiannya tentang “Pekerja Sektor Informal dan Pengembangan wilayah Kota Binjai”. Tuti Hidayati (2007) menemukan bahwa pekerja sektor Informal di Binjai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 75 %. Rata-rata mereka bekerja di sektor Informal berumur 40 tahun, 80 % diantaranya berstatus menikah dan 45.45 % atau hampir setengahnya berpendidikan SMA. Banyaknya lulusan SMA yang terjun ke sektor informal menunjukkan betapa sulitnya mencari pekerjaan pada sektor Informal.

Responden yang diteliti Hidayati, memiliki tanggungan keluarga 3 hingga 4 orang, sebanyak 54,54 % responden telah menekuni usaha di sektor informal selama 1 tahun hingga 4 tahun, bahkan 15,91 % diantaranya telah bedagang atau menjalankan usaha selama 21 hingga 25 tahun. Jam kerja pekerja bervariasi, tetapi yang paling besar, yaitu 75 %

bekerja antara 5 hingga 10 jam per hari. Modal kerja pedagang bervariasi dan ditemukan bahwa sebagian besar, yakni 56,82 % memerlukan modal antara 1 juta sampai 5 juta rupiah per bulan. Rata-rata omzet atau revenue per bulan kurang dari 5 juta; 38,64 % diantaranya memiliki omzet 1 sampai dengan 5 juta rupiah dan yang mempunyai omzet 6 hingga 10 juta rupiah sebanyak 34,09 %.

Para pedagang yang diteliti bekerja sebagai penjual makanan ringan, penjual minuman/es juice dan penjual nasi. Jumlah pembeli rata-rata 21 hingga 30 orang per hari. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh angka *r-square* sebesar 0,983 artinya 98,3 % variabel pendapat responden dapat dijelaskan oleh variasi himpunan *variable independen*, seperti rata-rata jam kerja per hari, modal kerja, pengalaman usaha, tingkat pendidikan, dan jenis usaha. Dari penelitian Hidayati (2007) juga diperoleh temuan bahwa keberadaan pedagang sektor informal turut mendukung pengembangan wilayah, khususnya dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang diserap sesuai *sample* penelitian sebanyak 84 orang, artinya 84 orang tersebut terhindar dari situasi pengangguran. Dari sisi ekonomi, kondisi ekonomi responden membaik, pendapat meningkat, dan kebutuhan ekonomi keluarga meningkat.

Penelitian Tuti Hidayati tentang pedagang kaki lima /PKL di Binjai bersifat *deskriptif*, yakni menjelaskan tentang profil pekerja sektor informal dilihat dari jenis kelamin, status pendidikan, lama bekerja, modal, omzet dan pendapatan. Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk

menganalisis data, baru dapat menjelaskan pengaruh variable ekonomi terhadap pendapat yang juga merupakan variable ekonomi. Aspek-aspek sosial tidak disentuh dalam penelitian Hidayati. Penelitian disetasi ini berbeda dengan penelitian Hidayati, karena penelitian ini mengkaji konflik yaitu konflik pedagang kaki lima /PKL terhadap perda penataan PKL, terutama dilihat dari apakah konflik tersebut merupakan perlawanan pedagang terhadap isi peraturan daerah (perda).

Zakik (2006) dalam penelitian berjudul “ Analisa Strategi dan Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima /PKL di Kota Surabaya”. menghasilkan temuan menarik.

Pertama, jumlah pedagang kaki lima /PKL mengalami peningkatan jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah PKL meningkat rata-rata 11,42%. Angka tersebut diduga lebih rendah dari keadaan sesungguhnya, karena masih banyak PKL liar yang tidak mudah didata. Pada tahun 2003, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya diperkirakan 10.699 orang dan jika diasumsikan seorang PKL menanggung 3 anggota keluarga, maka terdapat 42,769 orang yang hidupnya tergantung pada usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kedua, rata-rata pendapatan bersih PKL perbulan Rp 2,280,000,00 atau pertahunnya adalah 27.360.000.00. Jika dibandingkan dengan pendapat perkapita penduduk Surabaya pada tahun 2003 yang hanya Rp 16.585.503.00, maka pendapat Pedagang Kaki Lima (PKL) jauh lebih tinggi, yaitu 1 kali lipatnya. Artinya tingkat kesejahteraan PKL cukup

tinggi. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan PKL sektor informal yang dijalankan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga relatif murah yang dapat dijangkau oleh penduduk Kota Surabaya yang berpenghasilan pas-pasan.

Ketiga omzet rata-rata Pedagang Kaki Lima (PKL) perharinya sebesar Rp 262.000,00 dan dengan asumsi jumlah PKL sebanyak 10,699, maka dalam setahun total omzet PKL sejumlah Rp 842.546.250.000.00. Dengan *margin* pendapatan bersih terhadap omzet penjualan sebesar 34,7 %, maka diperoleh nilai tambah *output* sektor riil PKL sebesar Rp 292.363.584.750.00. Jika nilai *estimasi* PDRB atas dasar harga berlaku Surabaya. Tahun 2003 sebesar Rp 51.188.650.796.608.00, maka konstruksi *output* sektor informal PKL terhadap *pdrb* sebesar Rp 7.253.922.000.00 dan diasumsikan jumlah PAD kota Surabaya tahun 2003 sebesar Rp 305.649.488.100,00. Maka *rasio* nilai pungutan atau redistribusi PKL terhadap PAD sebesar 2,37 %.

Keempat, akses PKL terhadap sarana infrastruktur kota dan lahan sangat terbatas, karena lemahnya pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah Kota Surabaya.

Dari hasil penelitian tersebut, Zakik (2006) menyarankan (1) Perlunya memberikan *legitimasi* keberadaan PKL, berupa izin berdagang, (2) mengalokasikan lahan pemerintah yang tidak digunakan untuk aktivitas ekonomi PKL, dengan cara melibatkan pihak swasta dalam pengaturan penyediaan lahan, (3) memberi kemudahan kepada PKL untuk

mmengakses kredit untuk modal usaha, (4) memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PKL mengenai tatacara pengajuan kredit, *skill* manajemen bisnis, dan lain-lain, Serta (5) memberdayakan *asosiasi* atau pagayuban pedagang dalam membina dan mengembangkan Pedagang Kaki lima (PKL).

Dalam penelitiannya, Zakik membahas persoalan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti pendapatan dan *omzet* penjualan. Meskipun ditemukan bahwa akses PKL terhadap infrastruktur Kota terbatas, karena kebijakan pemerintah yang kurang memihak PKL, tetapi penelitian Zakik sama sekali tidak menyentuh persoalan adanya konflik sosial, utamanya dilihat apakah konflik tersebut menjadi faktor penentu bagi perlawanan/resistensi PKL terhadap kebijakan pemkot Semarang. Berbeda dengan penelitian ini dimana fokusnya menganalisis terjadinya konflik masalah penataan PKL, sehingga menimbulkan perlawanan pedagang terhadap peraturan daerah (perda), faktor penyebabnya, dan bagaimana *solusi* mengatasinya.

Ishak Kadir, (2010) dalam penelitiannya berjudul “ Studi Karakteristik Penggunaan Ruang Pedagang Kaki Lima /PKL di kawasan eks pasar Lawata studi kasus jalan Suropati Kendari”. Memberikan beberapa kesimpulan :

Pertama, kecenderungan Pedagang Kaki Lima (PKL) berlokasi di pasar Lawata, karena koridor jalan di pasar tersebut memiliki tarikan pengunjung yang paling tinggi.

Kedua, 50 % Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai *area* untuk melakukan aktivitas berjualan, karena untuk memudahkan pengunjung memperoleh barang kebutuhan sehari-hari tanpa harus meninggalkan kendaraan di tempat yang jauh.

Ketiga, diantara para Pedagang Kaki Lima (PKL) 30 % diantaranya menggunakan *area* hijau untuk berdagang dan 20 % lainnya menggunakan halaman rumah atau lahan kosong milik warga masyarakat untuk aktivitas berjualan. Area ini bisa digunakan karena pemilik lahan menyewakannya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kempat banyaknya pembeli berdatangan ke *area* Pedagang Kaki Lima (PKL) ini karena barang sembako dan kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-sayuran dan ikan dengan harga terjangkau.

Kelima lokasi pasar Lawalata berdekatan dengan dengan fasilitas umum, seperti perkantoran, perbankan, *Supermarket/ Mall* dan transportasi umum.

Hasil penelitian Khadir hampir sama dengan penelitian Hidayati bersifat *deskriptif*, dimana Kadir berusaha menampilkan profil Pedagang Kaki Lima (PKL), utamanya yang berkaitan dengan lokasi berdagang.. Kadir sama sekali tidak melihat konflik sosial sebagai hal penting dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian disertasi ini untuk melihat konflik yang terjadi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan aparat satpol PP sebagai *variable* penting yang menyebabkan perlawanan mereka terhadap Pemkot Madiun.

Dalam penelitian tentang “ Kebijakan Publik bagi PKL di lokasi strategis di Semarang” FT Undip dan Bapeda (2007) memberi kesimpulan sebagai berikut *Pertama*, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Semarang khususnya di lokasi strategis, pertumbuhannya tidak terkendali. Masalahnya adalah perda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dihiraukan, sehingga Kota Semarang semrawut.

Kedua pertumbuhan Kota Semarang sebagai pusat bisnis dan perdagangan menjadikan kawasan simpang Lima menjadi daya tarik sendiri bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penelitian FT Undip dan Bapeda hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Semarang dan sama sekali tidak melihat faktor lain, selain variable ekonomi. Sedangkan disertasi ini tidak hanya mengkaji masalah ekonomi semata tetapi juga melihat masalah konflik, utamanya konflik sosial sebagai faktor penguat perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap isis peraturan daerah (perda).

Budiman (2010) dalam penelitian tentang “ Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Banjaran Kabupaten Tegal”. Mengemukakan kesimpulannya sebagai berikut :

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Banjaran memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah membuka lapangan kerja dan kontribusi pendapat asli daerah.(PAD), melalui redistribusi sebesar 3,16% dari total redistribusi daerah.

Sedangkan dampak negatifnya, (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati ruang publik yang bukan peruntukannya, seperti trotoar, bahu jalan, sehingga merugikan masyarakat pada umumnya.(2) Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menyebabkan kemacetan jalan lalu lintas, menurunkan kualitas lingkungan sebagai akibat sampah yang dihasilkan per hari sebanyak 4,25 M, polusi mata (sampah), pencemaran udara, dan tercemarnya air sungai Kali Jambangan.

Bedasarkan hasil penelitian ini, Budiman menyarankan agar kawasan Banjaran ditata sedemikian rupa dengan melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) masyarakat, dan pemerintah. Selain itu disarankan agar PKL direlokasi dalam pasar dan melibatkan *stakeholder* dalam menangani dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penelitian Budiman baru terbatas pada kajian tentang dampak positif dan negatif dari keberadaan PKL di Kabupaten Tegal. Dampak positif berkaitan dengan masalah ekonomi sedangkan dampak negatif berkaitan dengan persoalan keruangan. Disertasi Budiman belum melihat sama sekali faktor konflik sosial, apalagi masalah perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian disertasi ini melihat terjadinya konflik sosial dan peranannya sebagai faktor penguat terjadinya perlawanan terhadap Perda Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dewan Riset Nasional dan Bapennas bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, sebagaimana disunting Firdausy (1995) dalam penelitiannya tentang “ Pengembangan Sektor

Informal Pedagang Kaki Lima di perkotaan, mengemukakan beberapa kesimpulan :

Pertama, karakteristik usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Kedua Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya menghadapi permasalahan, seperti banyaknya pesaing usaha sejenis, sarana. Prasarana perekonomian yang tidak memadai, belum ada pembinaan yang memadai, akses kredit terbatas, lemah struktur permodalan. Selain hal tersebut, Pedagang Kaki Lima (PKL) lemah dalam organisasi dan manajemen, komoditi yang dijual terbatas. Dan pendidikan, ketrampilan terbatas, kualitas Sumber Daya Alam (SDM) kurang memadai dan tidak ada kerjasama usaha.

Ketiga, namun demikian ditemukan bahwa keterbatasan yang dimiliki Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terlalu dapat diartikan bahwa sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang berpendapatan rendah. Buktinya, sebagian responden yang diteliti berpenghasilan bersih Rp 250.000.00 per bulan.

Keempat, berdasarkan perhitungan statistik. terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pendidikan dan lama usaha dengan tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL). Faktor positif yang mendorong peningkatan pendapat Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah modal usaha. Artinya, makin besar modal usahanya, akan makin tinggi tingkat pendapatan. Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian Bapenas dan DRN

diatas baru menjelaskan *variable* sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL), utamanya dominasi *variable* ekonominya dengan perhitungan statistik, diungkapkan hubungan antara variable-variable sosial ekonomi.

Penelitian disertasi ini sama sekali tidak membahas persoalan konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan aparat satpol PP dan perlawanan pedagang kaki lima, sebagai faktor penyebab utamanya. Sedangkan disertasi ini mengkaji tentang terjadinya perlawanan pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap perda pedagang.

Alisyahbana dalam penelitiannya tentang “Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan di Surabaya”, menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya merupakan suatu proses panjang yang berjalan secara *simultan*. Tahap tersebut antara lain mulai dari tahap pragerakan, tahap membangun kesadaran *kolektif*, membentuk organisasi gerakan, merapikan dan merapatkan barisan, melakukan perlawanan, sampai dengan tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi tersebut meliputi membangun semangat pantang menyerah dan melawan terus tanpa mengenal lelah.

Kedua, langkah puncak yang dilakukan organisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah melakukan gerakan perlawanan secara nyata, yang ditempuh dengan demonstrasi, turun kejalan, mendatangi gedung DPRD/Walikota, melawan petugas saat ditertibkan dan main kucing-kucingan dengan petugas.

Dilihat dari sudut kebijakan, bentuk perlawanan PKL dalam menghadapi kebijakan penataan oleh pemerintah, dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu, (1) perlawanan yang dikembangkan untuk menolak lahirnya perda. (2) perlawanan terhadap program relokasi. (3) dan perlawanan terhadap penggusuran.

Penelitian disertasi ini berbeda dengan apa yang diteliti Alisyahbana, karena penelitian ini lebih fokus pada sejauh mana perlawanan tersebut terjadi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan satpol PP dan faktor-faktor penyebabnya.

Penelitian dan kajian diatas yang dilakukan peneliti, lebih banyak memotret permasalahan ekonomi belaka. Jika kalau ada yang mengkaji politik, seperti Alisyahbana namun penelitian tersebut belum memasukkan unsur konflik terbuka dalam menangani masalah konflik antara pedagang kaki lima dengan aparat satpol PP Pemkot Madiun.

Penelitian ini juga ingin mengkaji, apakah konflik tersebut memiliki kaitannya dengan masalah sosial politik, atau murni karena ada tindakan melawan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sebab adanya tindakan represif oleh aparat. Dalam penerapan peraturan daerah (Perda) pedagang kaki lima (PKL) atau Surat Keputusan Kepala Disperindag Kota Madiun seharusnya ada sosialisasi kepada pedagang secara *maximal* tentang pembatasan jam jualan pedagang di kawasan Alun-alun Kota Madiun. Perlawanan yang terjadi oleh pedagang kaki lima (PKL) disebabkan kurangnya proses sosialisasi.

Abdul Yuli Gani, dalam disertasinya yang berjudul “ Tindakan Kolektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka proses pembuatan Kebijakan Publik yang Partisipasif (Studi tentang proses proses pembuatan kebijakan publik dalam penataan sektor informal).

Permasalahan pedagang kaki lima di Kota Malang sangat kompleks, dimana satu sisi keberadannya dapat menciptakan lapangan kerja, membantu ekonomi rakyat kecil dan meningkatkan PAD. Namun disisi lain keberadannya menimbulkan kota semakin semrawut, dan kumuh. Perda No. 1/ tahun 2001 dan SK Wali Kota No 580 tahun 2000 yang bertujuan untuk mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan upaya mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholders*, ternyata belum dapat memuaskan semua pihak. Hasil penelitian Abdul Gani menyatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah kota Malang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholders*. Kebijakan yang dibuat belum mengacu pada pendekatan yang mengacu pada pendekatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai demokratis dalam perspektif *post-positivisme* dan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bertambah banyak. Sementara Pemkot Malang tidak mampu menganyanya. Untuk keperluan tersebut agar kebijakan yang bersifat *top-down* perlu menilai kembali dampak kebijakan yang telah dilaksanakan baik positif maupun negatif sebagai umpan balik dalam pembuatan kebijakan publik.

Untuk keperluan tersebut pemerintah Malang hendaknya :

Pertama melaksanakan *law-informant* terhadap oknum aparat, mafia yang berdagang, serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar dengan melibatkan masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), perguruan dan mereka yang peduli terhadap masalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kedua, institusi atau paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang harus dibina agar kuat dan berdaya untuk mengatasi masalah mereka bersama, agar mampu menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mandiri.

Ketiga. pemerintah Kota Malang perlu menyediakan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan dan semua pihak untuk mengawasi dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keempat, pemerintah kota Malang seharusnya dapat memberi akses yang lebih luas kepada PKL serta memperlakukan mereka sebagai mitra agar terjadi hubungan dan kebersamaan dalam menentukan arah kebijakan.

Kelima, Pemerintah Kota Malang hendaknya memiliki perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penelitian Abdul Juli Andi Gani, menggunakan pendekatan kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari *informan*, meliputi pedagang formal, Pedagang Kaki Lima (PKL), Ketua Paguyuban, 41 dari eksekutif, masyarakat umum, tokoh masyarakat.

Penelitian Abdul Gani, mengkaji tentang kebijakan publik yang dibuat pemkot Malang dalam upaya menata, mengatur pedagang kaki

lima, tetapi tidak menyinggung masalah konflik dan perlawanan yang dilakukan oleh pedagang. Penelitian ini tentang konflik yang terjadi karena dalam pembuatan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak melibatkan tokoh paguyuban, tokoh masyarakat, akademisi di Kota Madiun. Akibatnya sewaktu dilaksanakan peraturan jam jualan terjadi perlawanan dari pedagang kaki lima, sehingga disertasi ini berbeda dengan penelitian Abdul Gani .

Eko Winarno dalam disertasi nya tentang Resistensi dan Akomodasi: Suatu kajian hubungan kekuasaan pada pedagang kaki lima, preman, dan aparat.

Penelitian ini, mengenai hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah kota dengan pelaku sektor informal, lebih khusus lagi tentang pedagang kaki lima di Depok Jawa Barat dalam memahami, mengintepretasi terhadap pemberlakuan perda Pedagang Kaki Lima (PKL). Kehidupan mereka terancam oleh tindakan aparat satpol PP, preman, aparat untuk menguasai trotoar dengan melakukan negoisasi dan akomodasi.

Hubungan-hubungan kekuasaan tersebut menjadi rebutan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan preman, aparat yang ingin melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Para pelaku seperti preman, aparat, yang terlibat dalam strategi negoisasi dan akomodasi yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi di trotoar merupakan praktik-praktik sosial

yang menandai kerja kekuasaan, Karena ada hubungan-hubungan antara struktur dan agensi (Gidden : 1979).

Lebih jauh Foucault menyatakan bahwa resistensi selalu hadir bersama ada kekuasaan dan dimana ada kekuasaan disitu ada resistensi, sebagai adanya kekuasaan tersebut disitu ada perlawanan.

Hal ini oleh para ahli antropologi dan sosiologi seringkali dikaitkan dengan sifat *hegemoni* yang melekat pada kekuasaan tersebut (Gramsci dalam Durasi; 2001).

Kekuasaan selalu hadir dalam ruang sosial dimanapun dan memasuki ruang praktik.

Temuan dalam penelitian Eko Winarno antara lain :

Pertama trotoar dimaknai sebagai salah satu ruang publik yang peruntukannya di atur oleh perda. Selama ini sering mengundang kontroversi dari masing-masing pihak yang berkepentingan terutama pedagang. Pedagang kaki lima sering melakukan perlawanan untuk mengimbangi aparat satpol PP. Pada saat lain Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan *negoisasi* dan akomodasi untuk mempertahankan trotoar sebagai tempat usaha. Proses tarik menarik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan satpol PP menandai adanya bekerjanya kekuasaan sesuai kepentingan mereka.

Kedua, Proses negoisasi dan akomodasi dilakukan oleh masing-masing untuk menguasai trotoar, oleh karena itu trotoar bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) bersikap resistensi dalam menghadapi aparat satpol PP.

Tindakan akomodasi dan negoisasi merupakan sikap untuk memperkuat penguasaan ruang publik.

Ketiga, tindakan *resistensi negoisasi*, akomodasi dalam hubungan kekuasaan Pedagang Kaki Lima (PKL), preman, aparat, merupakan *konstelasi* yang tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja, tetapi pemerintah hendaknya arif, sehingga tidak lagi terjadi tindakan kekerasan kepada pedagang kaki lima.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini mengkaji model-model perlawanan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Alun-Alun kota Madiun tentang kebijakan oleh pemkot Madiun. Karena kurang sosialisasi dan pendekatan yang *maximal* kepada pedagang akhirnya terjadilah sikap melawan sebagai bagian dari konflik yang sebenarnya sudah ada.

1.3 Permasalahan Penelitian

Kota Madiun merupakan kota yang paling sering terjadi penertiban pedagang kaki lima. Sejak dijabat oleh Achmad Ali hingga Bambang Irianto, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak dilakukan satpol PP, tidak hanya terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjalankan aktifitas ekonomi di pusat-pusat kota seperti di Alun-alun Kota Madiun tetapi juga Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di pinggiran Kota.

Model-model perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dikaji dalam penelitian ini, bukan

persoalan masalah penertibannya, melainkan masalah adanya bentuk perlawanan yang variatif yang menimbulkan model-model menarik dalam konflik Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan satpol PP yang disebabkan oleh penataan jam jualan pedagang. Kebijakan yang tertuang dalam isi perda menimbulkan konflik dan perlawanan pedagang.

Permasalahan pokok dari penelitian ini adalah “ Model-model Perlawanan Pedagang Kaki Lima/PKL terhadap penerapan kebijakan pemkot Madiun”. Permasalahan tersebut dipecahkan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab pedagang kaki lima (PKL) di alun-alun Kota Madiun melakukan berbagai tindakan perlawanan terhadap kebijakan tentang pedagang kaki lima (PKL).
2. Bagaimanakah model-model perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kota Madiun.
3. Bagaimana dampak model-model perlawanan yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat merespon kebijakan pemerintah kota Madiun.

BAB:II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) pertama kali dikenal sejak zaman Belanda tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa. Raffles mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau 1,2 M dari bangunan formal di pusat kota. (Danisworo, 2000). Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang. Tempat berdagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota. Disinilah yang kelak dikenal dengan “Kaki Lima” dan pedagang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “ Pedagang Kaki Lima atau PKL”.

Pada saat ini pedagang kaki lima (PKL) bukan lagi ditujukan kepada pedagang informal yang berada 5 kaki dari suatu bangunan formal, tetapi telah meluas pengertiannya menjadi istilah untuk menyatakan seluruh pedagang yang berjualan secara informal.

Dinas Tata Kota, kota Madiun (2000) mencatat beberapa ciri umum yang dapat digunakan untuk mendefenisikan keberadaan pedagang kaki lima:

- a. Dilakukan dengan modal kecil oleh masyarakat ekonomi lemah.
- b. Biasanya dilakukan perseorangan atau keluarga tanpa suatu kongsi dagang.
- c. Selalu berada dekat jalur sirkulasi atau lokasi yang paling sibuk.
- d. Menggunakan fasilitas publik sebagai lokasi berjualan seperti trotoar, badan jalan, dan lain-lain.
- e. Menggunakan gerobak atau tenda sederhana yang cukup *fleksible* untuk dipindah-pindahkan.

Firdausy (1995) merangkum pedagang kaki lima menjadi 3 aspek yaitu, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek lingkungan. Dalam aspek ekonomi, karakteristik pedagang kaki lima ditandai ciri-ciri sebagai berikut : meliputi berbagai usaha yang luas, mudah dimasuki oleh pengusaha baru, bermodal relatif kecil, konsumen lokal, berpendapatan menengah kebawah, teknologi sederhana, tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas.

Sementara dalam aspek sosial budaya pedagang kaki lima : tingkat pendidikan rendah, terdiri atas para migran, jumlah anggauta rumah tangga besar, bertempat tinggal didaerah kumuh di kota dan jam kerja relatif lama. Jika dilihat dari aspek lingkungan pedagang kaki lima (PKL) memiliki ciri-ciri, kurang mengutamakan kebersihan, jorok, kotor, serta berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Menurut Kartono dkk Pedagang kaki lima/PKL (1980: 3-7) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Merupakan pedagang yang

sekaligus sebagai produsen, (2) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau *stand* yang tidak permanen serta bongkar pasang, (3) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang konsumsi lainnya yang tahan lama eceran, (4) pada umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan pendapatan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payahnya, (5) Kualitas barang nya rendah dan biasanya tidak berstandar, (6) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, pembeli pada umumnya berdaya beli kecil, (7) usaha skala kecil berupa *family enterprise* (perusahaan keluarga) dimana ibu, anak, turut serta membantu baik langsung maupun tidak langsung, (8) Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi khas pada usaha pedagang kaki lima. (PKL).(9) Dalam melaksanakan pekerjaan ada yang secara penuh, sebagian lagi pada waktu senggang/longgar ada pula yang melaksanakan pekerjaan musiman,(10) Barang yang dijual biasanya *convenience goods* (bermutu umum) jarang sekali *specialy goods* (bermutu khusus), dan (11) seringkali berada dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba pada waktu berdagang ada operasi oleh Tim Penertiban Umum (TIBUM) dari Sat pol PP pemerintah Kota Madiun.

Subangun menyatakan bahwa sektor informal dan sektor formal menunjukkan ciri-ciri yang bertentangan. Sektor formal memiliki ciri-ciri seperti: (1) Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya seadanya. (2)

Ukuran usahanya umumnya kecil dan aktifitasnya merupakan usaha keluarga. (3) untuk menopang usahanya digunakan teknologi tepat guna dan memiliki sifat padat karya. (4) Tenaga kerja yang bekerja dalam aktivitasnya umumnya terdidik terlatih dalam pola-pola tidak resmi. (5) Seluruh aktivitas mereka dalam sektor ini berada di luar jalur yang diatur pemerintah (4) Aktifitas mereka bergerak dalam pasar yang sangat bersaing.

Sedangkan sektor informal ditandai dengan ciri-ciri : (1) seluruh aktifitasnya umumnya bersandar pada sumber daya sekitarnya. (2) Ukurannya usahanya berskala besar dan memiliki badan hukum, (3) untuk menjalankan roda aktifitas nya ditopang oleh teknologi yang padat modal dan biasanya merupakan hasil impor. (4) umumnya tenaga kerjanya mendapat pelatihan dan pendidikan di lembaga formal. (5) Tenaga kerja di sektor ini bukan saja bersifat formal tetapi umumnya tenaga ahli asing (*expatriatee*) dan (6) seluruh aktifitasnya berlaku dan berjalan dalam pasar yang terlindungi (misalnya, tarif, kuota, lisensi).

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa posisi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam sistem ekonmi yang berlaku di Indonesia berada dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan posisi mereka dianggap sebagai *patologi sosial* sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah penganggguran, sebagai tersier, sebagai parasit, sumber pelaku kejahatan, sampah masyarakat, penghambat pembangunan, perusak citra kota, sejajar dengan pengemis, pelacur dan pencuri. Dengan tidak diakuinya Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam sistem ekonomi, maka negara dengan

mudahnya melakukan tindakan kesewenang-wenang seperti penggusuran dan pengusiran bahkan kadang-kadang represif.

Kebijakan tata ruang yang diterapkan cenderung berpihak pada kaum pemilik modal, menganggap kaum miskin kota sebagai pihak yang mengganggu tata ruang sehingga perlu ditata atau digusur. Padahal sebenarnya motivasi pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok hidup yaitu makan, minum, bukan yang lain seperti rumah, mobil apalagi sekolah.

Menurut Subangun (1994: 53-54) menyatakan bahwa sektor informal dan sektor formal menunjukkan ciri-ciri yang bertentangan. Sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut, (1) seluruh aktifitasnya bersandar pada sumber daya seadanya, (2) ukuran usahanya umumnya kecil dan aktifitasnya merupakan usaha keluarga, (3) untuk menopang usahanya dipergunakan teknologi tepat guna dan memiliki sifat yang padat karya,(4) tenaga kerja yang bekerja dalam aktifitas sektor ini umumnya terdidik atau terlatih dalam pola-pola yang tidak resmi, (5) seluruh aktifitas mereka dalam sektor ini berada diluar jalur yang diatur pemerintah, dan (6) Aktifitas mereka bergerak dalam pasar yang sangat bersaing.

Sedangkan sektor formal dengan ciri-ciri : (1) seluruh aktifitas umumnya bersandar pada sumber daya sekitarnya, (2) ukuran usahanya berskala besar dan memiliki badan hukum, (3) untuk menjalankan roda aktifitasnya umumnya ditopang oleh tehnologi yang padat modal dan biasanya merupakan hasil impor,(4) tenaga kerja dalam sektor ini umumnya

mendapatkan latihan dan pendidikan di lembaga formal, (5) Pra tenaga kerja yang terlibat di sektor ini bukan saja bersifat formal tetapi sering kali tenaga kerja asing (*expatriate*), dan (6) seluruh aktifitas berlaku dan berjalan didalam pasar yang terlindungi.

Gambaran sektor informal diatas menunjukkan betapa sektor informal tidaklah bersifat *homogen* tetapi sangat *heterogen*. Sejumlah ilmuwan sosial mencoba membagi sektor informal perkotaan menjadi dua subsektor, *Pertama* kegiatan ekonomi keluarga berskala kecil dengan pendapat sangat bervariasi tetapi terjadi sejumlah akumulasi modal sebagai hasil keunggulan kompetitif dan atau kelihaian berdagang. Ekonomi mereka tak menentu, hanya bersifat subsistem mengingat kebanyakan usaha mereka hanya berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang berstatus rendah dengan ketrampilan rendah pula. Pendapat lain menyebut subsektor diatas sebagai subsektor *intermediate* yang merupakan kelompok *enterprenuer* yang dinamis.

Kedua, komunitas miskin yang merupakan fenomena kelebihan tenaga kerja surplus. Kelompok ini berpendapat bahwa sektor informal sebagai bentuk usaha bersifat *temporer* karena masih berharap dapat beralih ke sektor formal. Sedangkan yang pertama memperlakukan sektor informal sebagai pekerjaan yang permanen atau tetapi, karena menjanjikan perkembangan ekonomi (Surbakti; 1977)

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan antara sektor informal dan sektor formal

No.	Aspek yang dibedakan	Sektor Informal	Sektor Formal
1	Skala usahanya	Kecil tidak badan hukum	Menengah s/d besar badan

2	Pembukuan usaha	Tidak ada / seadanya	Ada dan diprioritaskan
3	Kelayakan usaha	Tidak ada / sederhana	Ada sesuai standar
4	Perencanaan usaha	Ada sambil jalan	Ada dan terus menerus
5	Permodalan	Kecil	Menengah s/ besar
6	Sumber modal	Milik sendiri / patungan	Milik sendiri / patungan
		Bank titil (bank tidak resmi)	Bank Umum (bank resmi)
7	Perputaran Modal	Lambat	Cepat
8	Pengakuan Negara	Tidak ada / kecil	Diakui
9	Perlindungan Hukum	Tidak ada / kecil	Dilindungi
10	Bantuan Negara	Tidak ada / tidak sampai	Rutin
11	Izin usaha	Tidak resmi	Resmi dari negara
12	Pemberi ijin	RT / RW / Tetangga	Resmi dari negara
13	Unit usaha	Mudah berganti	Relatif tetap
14	Kegiatan usaha	Kurang terorganisir	Sangat terorganisir
15	Organisasi	Keluargaan	Birokrasi
16	Teknologi yang digunakan	Sederhana / padat karya	Moden dan padat modal
17	Pendidikan formal	Tidak perlu	Sangat diperlukan
18	Ketrampilan	Tidak diperlukan	Di didik oleh pemerintah
19	Jam kerja	Tidak tentu	Sudah terjadwal
20	Stok barang	Sedikit s/d sedang	Sedang s/d besar
21	Kualitas barang	Rendah s/d menengah	Standart
22	Omzet	Tidak tentu dan sulit	Tidak dapat diprediksi
23	Khalayak sasaran	Kelas bawah, menengah	Menengah, kelas atas
24	Jumlah karyawan	Tidak tentu 1-5	Tertentu / lebih 5 orang
25	Hubungan kerja	Keluargaan percaya	Kontrak kerja
26	Hubungan majikan buruh	Keluargaan	Bebas memilih karyawan
27	Tempat usaha	Mudah berpindah	Permanen dan

			rata luas
28	Kontribusi negara	Relatif kecil	Relatif besar
29	Karakteristik usaha	Mudah dimasuki	Sulit dimasuki

Sumber : Alisyahbana. 2005 : 36

Berdasarkan ciri-ciri diatas posisi ekonomi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan sangat lemah dan dipinggirkan, tidak diakui eksistensinya, tidak dapat perlindungan hukum. Bahkan menurut pemerintah dianggap sektor yang negatif bertentangan dengan praktik ekonomi, patologi sosial, tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan dan sebagai sektor yang ekonomi bayangan, yang aselalu ditekan agar tidak berkembang.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kegiatan ekonomi sektor informal berkembang dan mengambil berbagai macam bentuk. Dari berbagai macam bidang pekerjaan yang ada pada sektor informal, salah satunya yang menonjol adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut Soedjana (1981) Secara spesifik yang dimaksud Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau tepi/ pinggir jalan, disekitar pusat perbelanjaan/ pertokoan, pasar pusat rekreasi/ hiburan menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau tidak resmi dipusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Karakteristik Sektor Informal, Konsep sektor informal diperkenalkan pertama kali oleh organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 1973, dalam laporan resmi mengenai misi tenaga kerja di Kenya. Sektor disebut

informal sebab sangat berbeda dengan dari karakteristik sektor formal.

Beberapa alasan mengapa disebut informal sebagai berikut (Hansenne,1997: 7)

- 1.Sektor informal tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam statistik resmi.
2. Sektor ini cenderung memiliki sedikit atau tidak sama sekali akses pada pasar yang terorganisasi /pangsa pasar tidak jelas.
- 3.Institusi/ lembaga kredit, pendidikan formal dan lembaga pengajaran atau jasa dan fasilitas publik.
4. Sektor informal tidak dikenal, tidak didukung atau diatur oleh pemda.
5. Mereka sering dipaksa oleh keadaan untuk beroperasi diluar hukum dan menghormati aspek-aspek hukum tertentu, dimana mereka berada diluar batas perlindungan hukum perundang-undangan buruh dan tindakan perlindungan di tempat kerja.

2.1.2 Hubungan sektor Informal dengan sektor Formal.

Sektor informal sebenarnya banyak manfaatnya bagi kehidupan kota. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar pekerja sektor formal tergantung pada dagangan dan jasa dari sektor Informal. Fungsi sektor ini sebagai ujung tombak pemasaran berbagai produk sektor formal tidak dapat dipandang sebelah mata peranannya dalam perekonomian dan diabaikan untuk membangkitkan dan menggerakkan ekonomi di perkotaan.

Sektor informal sering dijadikan pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang berada di sektor formal, seperti pemilik toko yang sore hari jualan bakmi dsamping toko nya. Alasannya karena mudah dijalankan tanpa prosedur yang

macam-macam dan sering kali efektif untuk menarik pembeli. (Rachbini, 1994 : xiii).

Menurut Mc. Gee, dan Yeung, Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai pengertian sama dengan '*hawkers*', berarti sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sesungguhnya sektor informal menjadi sebuah dilema, pada satu sisi sektor ini dapat menyerap banyak pekerja yang tidak dapat ditampung dalam sektor formal. Disisi lain sektor ini dapat merusak lingkungan, lingkungan kumuh, jorok, tidak sehat, kotor yang adapar menggagalkan pemerintah meraih piala adipura. Sehingga ada upaya pemerintah untuk memperhatikan masalah PKL, biar dengan sendirinya pelan musnah.

Menurut Todaro (2000 : 351-352) ciri-ciri sektor informal disebutkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar memiliki produksi berskala kecil, aktifitas-aktifitas, dimiliki oleh perorangan atau keluarga dan menggunakan teknologi sederhana.
2. Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal.
3. Produktifitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah dari pada sektor formal, para pekerja sektor informal tidak dapat merasakan dan menikmati perlindungan seperti yang dapat dari sektor formal.

4. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsung kerja kondisi kerja yang layak dan jaminan pensiun.
5. Kebanyakan pekerja yang bekerja di sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal.
6. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat bertahan hidup dan bukan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan serta hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan.
7. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan, meskipun mereka bekerja dengan waktu panjang.
8. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum*) dan pemukiman liar (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi, jasa kesehatan dan kesempatan pendidikan.

Menurut Wirosarjono (dalam suri, 2003:27) ciri sektor informal antara lain :

1. Pola kegiatannya tidak teratur dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaan dalam kegiatannya.

2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kegiatannya dikatakan liar.
3. Modal, peralatan, dan kelengkapannya maupu omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
4. Tidak mempunyai tempat yang permanen, di lokasi tertentu.
5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
6. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
7. Umumnya satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama.
8. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) ber *aglamerasi* pada simpul-simpul pada jalur pejalan kaki yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat pasar publik, terminal, pasar daerah *komersial*. (Mc Gee dan Young : 1977 : 76).

Menurut Peraturan daerah Kota Madiun No.8 tahun 2002 tentang pengaturan tempat dan pembinaan pedagang kaki lima adalah pedagang oleh pemerintah dianggap lemah yang menggunakan bagian dari fasilitas umum untuk sebagai tempat kegiatan usahanya dengan menggunakan

peralatan bergerak atau tidak bergerak. Fasilitas umum adalah segala fasilitas yang disediakan oleh kota Madiun untuk kepentingan umum antara lain, jalan, trotoar, jalur hijau, aluun-alun dan tempat-tempat lainnya. Dan tempat usaha disediakan oleh pemerintah kota Madiun untuk usaha pedagang kaki lima.

Dalam rangka realisasi perda, pemerintah kota Madiun mengeluarkan keputusan Wali Kota No. 13 tahun 2003 peraturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima sebagai berikut antara lain, (1) Dalam radius 10 M² dari kantor, sekolah, tempat dan fasilitas umum dilarang jualan Pedagang Kaki Lima (PKL). (2) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan harus mendapat izin wali kota Madiun. (3) Pelaksana pemberi ijin adalah Diperindag kota Madiun. Dan (4) Untuk mendapatkan ijin tempat berjualan harus mengajukan ijin ke walikota Madiun dengan melengkapi syarat antara lain KTP, surat keterangan lurah diketahui camat tempat usaha.

Ketentuan yang harus ditaati pedagang kaki lima antara lain, (1) Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan lingkungan setempat, (2) Pedagang harus mentaati jam jualan, (3) Pemakaian lahan tidak boleh melewati 6 M² dengan konstruksi lepas pasang, (4) Sanggup memindahkan usahanya bila lahan tersebut dipakai pemkot untuk kepentingan umum, (5) Pemasangan konstruksi tempat usaha tidak boleh merusak/ mengganggu fasilitas umum seperti badan jalan, trotoar, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan umum dan masuk pintu rumah

dan toko, dan (6) Pemegang ijin tidak boleh menjual belikan ijin ke pihak ketiga.

2.2 Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang sesuai dengan fokus kajian penelitian yaitu teori perlawanan, dan teori konflik. Teori-teori tersebut selaras dengan fokus penelitian yaitu model-model perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan Pemkot Madiun (PKL).

2.2.1 Konsep Perlawanan Pedagang Kaki Lima

2.2.1.1 Sebab-sebab Terjadinya Perlawanan Pedagang Kaki Lima.

Kajian ini berangkat dari anggapan dasar bahwa terjadinya perlawanan PKL disebabkan oleh beberapa hal yang melatar belakangi. Untuk analisis secara teliti, dituntut melakukan telaah terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perlawanan PKL terhadap pemerintah Kota Madiun. Faktor-faktor penyebab tersebut berfungsi mempersiapkan kondisis sosial, ekonomi-politik dan psikologis bagi munculnya ketidakpuasan dan frustasi PKL kepada pemerintah Kota Madiun.

Pendekatan teoritik yang mencuat untuk memahami realitas sosial perlawanan PKL terhadap pemerintah kota, yaitu teori yang dikemukakan oleh James Scott dan Samuel Popkin. Konsep yang perlawanan yang dikemukakan oleh Scott adalah perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*) yaitu perjuangan biasa-biasa saja, namun terjadi terus menerus antar kaum tani dan orang-orang yang berusaha menarik tenaga kerja, makanan, pajak sewa dan keuntungan dari mereka.

Kebanyakan perlawanan model ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang terang secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh kelompok orang yang tidak berdaya, mengambil makanan, menipu, berpura-pura patuh, mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu, mengumpat di belakang, membakar, melakukan sabotase dan seterusnya (Scott. 2000: 40)

Dalam definisi lain, Scott (1993: 302) mendefinisikan perlawanan adalah setiap/semua tindakan para anggota kelas atas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan (misalnya :sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya, tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan. Kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atas ini.

Berdasarkan definisi tersebut ada tiga benang merah yang patut digaris bawahi :

pertama, tidak ada keharusan bagi perlawanan untuk mengambil bentuk aksi bersama. Aksi yang dilakukan bisa bersifat individual, spontan, dan tak terorganisasi.

Kedua, tujuan-tujuan perlawanan dibentuk, yakni agar ada reaksi balik dari pihak yang dilawan. Reaksi tersebut berupa tindakan yang melunakkan atau menghilangkan segala bentuk tuntutan yang dibebankan kepadanya.

Ketiga, perlawanan yang dimaksud lebih mengarah pada perlawanan simbolis atau ideologis (misalnya gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan, penarikan kembali sikap hormat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlawanan berdasarkan kelas.(Scott: 1993: 303)

Menurut Scott (1993 : 303) perlawanan tindakan yang sekurang-kurangnya melibatkan suatu pengorbanan perorangan atau kolektif jangka pendek supaya diperoleh keuntungan bersama yang berjangka lebih panjang. Kerugian-kerugian langsung pemogokan, pemboikotan atau bahkan penolakan memperoleh pekerjaan atau tanah garapan merupakan bentuk pengorbanan jangka pendek yang diharapkan mampu memberi keuntungan untuk jangka panjang. Bagi Scott tindakan seperti ini dinamai dengan “kerelaan rutin” yaitu sebuah cara dimana mereka yang tidak berdaya menghadapi kelas di atasnya dengan menggunakan “topeng penyelamat”.

Dalam menjelaskan senjata kaum lemah ini. Scott mengambil contoh yang dikemukakan oleh Susan Carol Rogers saat melakukan penelitian tentang perlawanan budak. Menurut Rogers, para budak yang telah terikat kontrak selama hidup secara amat khas menyatakan rasa tidak puas tentang hubungan mereka dengan tuan tanah mereka menjalankan tugas sembrono dan tidak sempurna. Dengan sengaja atau tidak, mereka sering berpura-pura sakit, bermalas-malas enggan melakukan perintah, berpura-pura patuh, melakukan sabotase,

memperlambat pekerjaan, memperburuk kualitas kerja sering mengobrol, mencopet, berlagak tidak tahu atau sanggup melakukan sesuatu, mencuru untuk mendukung pasar gelap membunuh anak-anak membakar, melarikan diri, bunuh diri sehingga mengganggu ketenangan tuan mereka. Dalam pandangan Rodgers seperti itu akan berhasil manakala tindakan mereka dapat disembunyikan dibelakang topeng kepatuhan.

Dalam menjelaskan gaya model perlawanan petani, Scott melakukan perbandingan sepasang bentuk perlawanan yang sama-sama tertuju pada tujuan yang sama. Jenis pertama adalah perlawanan sehari-hari, yang kedua merupakan pembangkangan langsung yang mendominasi dunia politik kaum tani dan kelas buruh perkebunan dan hutan negara. Dalam perlawanan lainnya, petani mendudukkan tanah secara terbuka dan dengan terus terang menentang hubungan hak milik. Dipandang dari segi pendudukan dan penggunaan yang sebenarnya, pengerogotan dengan menduduki tanah secara liar mungkin dapat menghasilkan lebih dari pada pendudukan tanah dengan jalan membangkang secara terbuka, meskipun pembagian hak milik secara de jure tidak pernah ditantang secara terbuka.

Untuk menyakinkan pembaca bahwa perlawanan secara sembunyi-sembunyi mampu mencapai hasil yang lebih besar dari pada perlawanan secara terang-terangan, Scott kembali menggunakan contoh pembangkangan dalam program wajib militer di Perancis sekitar tahun 1862 yang dikutipkan dari hasil penelitian Cobb (1970). Dalam bentuk

perlawanan jenis pertama. terdapat banyak sekali warga kulit putih yang menciderai diri dan melakukan desersi untuk menghindari program wajib militer. Tindakan tersebut ternyata dapat melemahkan program konfederasi. Dalam bentuk perlawanan kedua terdapat suatu pemberontakan terbuka bertujuan menghapus wajib militer. Menurut Scott, perlawanan jenis pertamalah yang dapat mencapai sesuatu yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui pemberontakan. Tujuan disersi adalah menolong diri sendiri dan menarik diri dari, bukan mengadakan konfrontasi secara kelembagaan namun disersi dan aksi menghindar kecil-kecilan yang dilakukan oleh koalisis tanpa nama itulah akhirnya yang mampu menghapus wajib militer di negara itu (Scott : 2000 : 44)

Melalui contoh kedua tersebut, Scott (2002: 48) bahwa perlawanan isedential yang sifatnya perorangan, terpencar-pencar dalam kumunitas kecil, anonim, tanpa sarana kelembagaan, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal, sedikit memerlukan koordinasi yang tampaknya remeh itu tidak bisa diabaikan. Perlawanan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan sehari-hari apabila dilipatgandakan, maka aksi-aksi tersebut pada akhirnya merupakan tempat kehancuran total dari kebijakan-kebijakan yang dipimpin oleh pimpinan. Kebijakan minimal dirumuskan kembali sehingga lebih sesuai dengan harapan yang realistis sehingga mendapat dorongan-dorongan yang lebih positif dengan kepatuhan yang bersifat sukarela tanpa menggunakan alat pemakasan yang lebih keras.

Dalam beberapa kesempatan, perlawanan tersebut menjadi aktif, bahkan menjurus ke tindak kekerasan. Namun yang lebih sering terjadi adalah bahwa para petani mengambil tindakan dengan model pembangkangan pasif, sabotase secara halus, menghindarkan diri dan tipu-menipu. Perlawanan mereka tidak ditandai dengan oleh konfrontasi besar-besaran dan menantang, akan tetapi lebih berupa aksi menghindarkan diri secara diam-diam yang tidak kurang besarnya dan sering kali lebih efektif. (Scott : 2000:4).

Menurut Scott, tujuan perlawanan sehari-hari adalah dimaksudkan memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas yang dominan atau mengajukan klaim-klaim dalam menghadapi kelas-kelas yang lebih dominan. Sifat perlawanan sehari-hari adalah informal, sering tidak terbuka, pada umumnya hanya berkenaan dengan hasil-hasil langsung yang bersifat defacto (Scott, 200: 42-43).

Menurut Scott, apabila tujuan perlawanan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang demikian mendesak seperti keamanan fisik, makanan, tanah, atau pendapatan, maka para petani bisa saja melakukan perlawanan yang relatif aman, yakni berada dalam garis perlawanan yang bersifat lunak. Untuk memperkuat pendapat ini Scott (2000: 47), mencitohkan hasil penelitian Michael Wright yang melakukan penelitian terhadap petani Prusia. Para petani dan kaum proletar Pada Prusia pada tahun 1830 an, karena terjepit oleh kepemilikan tanah yang

kecil sekali dan gaji yang tidak cukup memnuhi kebutuhan hidup menjawabnya dengan melakukan migrasi dan mencuri kayu di hutan, makan ternak dan binatang buruan secara besar-besaran. Laju pencurian rimba tersebut meningkat apabila upah menurun, harga makanan meningkat dan apabila upaya migrasi lebih sukar. Lebih lanjut Scott dari Wright mengatakan bahwa resiko terhadap setiap orang yang melawan pada umumnya semakin berkurang apabila seluruh masyarakat terlibat didalamnya.

Berkaitan dengan tujuan perlawanan, Scott (1993: 316) menjelaskan bahwa tujuan perlawanan petani bukannya secara langsung menggulingkan atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah kepada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut. Dalam konsep ini Scott mengaku dililahi oleh pemikiran *Hobsbawm* (1973: 12) bahwa tujuan perlawanan sehari-hari adalah menjalankan sistem dengan kerugian minimal bagi dirinya. Selanjutnya Scott menjelaskan bahwa tujuan perlawanan sehari-hari adalah untuk menyedot dengan tekun sumber daya yang dimiliki oleh kelas atas sehingga dapat memukul balik, bahkan mampu mendapat keringanan dalam eksploitasi, mampu menghasilkan *negoisasi* yang mampu menghasilkan perkembangan yang menguntungkan dirinya.

Dalam menjelaskan perlawanan sehari-hari Scott menggunakan istilah model perlawanan berpamrih dan tidak berpamrih. Untuk menjelaskan tersebut Scott memperlihatkan terjadinya revolusi Rusia,

yang dilakukan oleh angkatan darat Tsar yang dibantu oleh petani. Revolusi Rusi berhasil karena dibantu oleh gerakan petani digaris depan untuk menyediakan makanan prajurit. Tindakan petani ini dapat dikatakan tidak terorganisir, tetapi tidak dapat dianggap remeh atau tidak berarti. Meskipun demikian Scott, bahwa tindakan petani tersebut sungguh sangat berpamrih untuk mendapatkan tanah, (Scott: 1993-307). Bagi Scott, antara pamrih dan perlawanan terintegrasi mampu membentuk tenaga yang luar biasa sebagai sumber yang menjiwai perlawanan. Bagi Scott model perlawanan tanpa pamrih merupakan pelecehan terhadap status moral dan kebutuhan fundamental manusia. Sifat intrinsik dari model perlawanan petani adalah karena adanya keuntungan-keuntungan yang didapat. Roti, mentega, tanah, dan bebas pajak adalah teriakan petani. Semua itu merupakan tujuan sekaligus hasil perlawanan yang mereka lakukan. Scott (1993: 317) perlawanan bukanlah sekedar apa yang dilakukan kaum tani untuk mempertahankan diri serta rumah tangganya, melainkan apa yang diperbuat harus dipahami sebagai suatu kerelaan sekalipun disertai gerutuan. Mereka melakukan strategi dengan mempertimbangkan serangkaian tindakan yang luas ragamnya demi kelangsungan hidup dengan menolak atau melunakkan tuntutan-tuntutan kelas yang berada.

Scott dengan menggunakan pendekatan moral ekonomi menganggap satu-satunya jalan keluar adalah dari dominasi yang ada adalah dengan mengutamakan prinsip dahulukan selamat (*safety first*)

untuk tetap mengamankan batas-batas substansi. Perlawanan petani merupakan reaksi defensif, tindakan akhir yang dilakukan untuk mempertahankan institusi tradisional mereka dan norma-norma *resiprositas* mereka dari ancaman kapitalisme dan kolonialisme. Perlawanan petani juga disebabkan oleh terusiknya norma-norma dan prosedur masyarakat petani yang dilingkupi kesadaran untuk mempertahankan subsistensi. Hal tersebut terjadi akibat meluasnya peran negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau. Revolusi hijau telah mengubah hubungan petani kaya dan petani miskin, dimana si kaya semakin kaya si miskin semakin miskin. Perubahan demikian ternyata melahirkan berbagai bentuk perlawanan kaum lemah terhadap *hegemoni* kaum kaya maupun negara. Studi Scott di Sedaka menunjukkan pada kenyataannya, petani miskin mampu membangun perlawanan terhadap *hegemoni* negara lewat penetrasi negara didalam proses transformasi hubungan-hubungan produksi dengan proses mekanisasi pertanian dan modernisasi pertanian.

Dalam *Weapons of The Weak*, Scott mampu menunjukkan akibat dari perubahan sosial terutama transformasi kultural lewat penetrasi negara ke dalam kehidupan desa, lahir sebuah realitas dari kaum miskin untuk membentuk kesadaran melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk yang merupakan pembelotan kultural. Realitas sosial perlawanan petani terhadap hegemoni negara sebagaimana digambarkan oleh Scott,

setidaknya menguatkan pendapat. Revolusi hijau masih banyak menghasilkan dampak negatif dari pada positif.

Studi Scott mampu menunjukkan akibat bahwa petani miskin mampu membangun perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*) terhadap hegemoni negara yang dirasakan sebagai bentuk *everyday forms of repression* (Scott, 1985:241). *Weapons of the weak* (senjata orang lemah) menunjukkan akibat dari perubahan sosial terutama transformasi kultural lewat penetrasi negara dalam kehidupan desa.

Weapons of weak juga menunjukkan bahwa kaum lemah sebenarnya memiliki senjata didalam membangun perlawanan menghadapi *hegemoni* kaum kaya maupun negara. Senjatanya dengan caranya sendiri seperti perusakan, berlaku tidak jujur, mencopet, masa bodoh, membuat skandal, membakar, sabotase ternyata mempunyai kekuatan tersendiri yang biasa dirasakan oleh petani dalam melampiaskan kekecewaannya. Dengan kata lain, sikap perlawanan yang dilakukan oleh petani disebabkan struktur kehidupan yang terjepit dan harus menyelamatkan diri, Berkaitan dengan peran otoritas moral dalam proses perlawanan.. Scott (1981) berkeyakinan bahwa terdapat suatu norma etik tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat yang digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan protes sosial, jika moral ekonomi terancam , mereka akan mencoba mempertahankan dan melakukan perlawanan sosial.

Dalam pandangan Scott (1993), pola-pola kegiatan yang telah ditentukan oleh institusi/negara dianggap petani sebagai hal yang

membahayakan kelangsungan hidup, adat istiadat dan hak, hak sosial tradisional. Tidak heran bila petani tidak mau menyesuaikan diri dengan peraturan itu dan akhirnya melakukan perlawanan.

Scott juga membedakan antara perlawanan sungguh-sungguh dengan perlawanan yang bersifat insidental. Perlawanan sungguh bersifat : (a) terorganisir, sistematis, kooperatif., (b) berprinsip atau tanpa pamri., (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi. Sebaliknya, tanda kegiatan “ yang bersifat insidental atau epifenomenal adalah: (a) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat untung-untungan dan berpamrih (nafsu akan kemudahan), (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) dalam maksud dan kondisinya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominan yang ada. (Scott, 1993: 395).

Scott juga berasumsi bahwa perlawanan petani merupakan sebuah gerakan yang semata-mata didasari oleh moralitas tradisional yang berorientasi ke masa lalu dan masa kini saja. Sehingga ketika ada aturan yang tidak sesuai atau dirasakan mengancam kelangsungan hidupnya para petani kemudian melakukan perlawanan terbuka.

Secara teoritik orang melakukan perlawanan karena langkah tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk keluar dari dominasi yang ada, kemudian melahirkan suatu moralitas yang disebut sebagai prinsip mendahulukan selamat (Scott. 1979). Prinsip mendahulukan keselamatan

merupakan sumber kekuatan moral bila mereka dihadapkan pada kenyataan yang tidak memberikan pilihan lain.

Berdasarkan uraian panjang lebar dapat disimpulkan bahwa konsep perlawanan Scot merupakan *everyday forms of resistance*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan moral ekonomi, perlawanan terjadi karena adanya ancaman kapitalisme dan terusiknya norma-norma dan prosedur masyarakat petani yang dilingkupi kesadaran untuk mempertahankan subsistensi. Perlawanan yang terjadi dilingkupi oleh moral ekonomi petani, mendahulukan selamat menghindari resiko. Dengan kata lain, *weapons of weak* yang terjadi sebagai reaksi defensif dan semangat untuk menyelamatkan diri, semangat mempertahankan institusi tradisional, akibat struktur kehidupan menyempit dan meluasnya peran negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau yang merugikan petani miskin. Perubahan demikian melahirkan perlawanan kaum lemah terhadap hegemoni kaum kaya maupun negara.

Perlawanan petani merupakan manifestasi dalam proses transformasi hubungan –hubungan produksi, sebagai buah dari tumbuhnya kesadaran untuk melakukan perlawanan. Perlawanan yang terjadi merupakan *everyday of resistance* terhadap hegemoni negara yang dirasakan sebagai bentuk *everyday of repression*. Perlawanan petani merupakan sebuah gerakan yang semata-mata didasari oleh moralitas tradisional yang berorientasi masa lalu dan masa kini, sehingga ketika ada aturan yang tidak sesuai atau dirasakan akan mengancam

kelangsungan kehidupan yang telah mereka miliki, para petani mengadakan perlawanan terbuka. Petani melakukan perlawanan karena langkah tersebut jalan satu-satunya untuk keluar dari dominasi yang ada.

Menurut pendapat Samuel Popkin (1979:16-17) dengan pendekatan ekonomi politik beranggapan, semua model perlawanan petani bukan untuk menentang revolusi hijau ataupun perubahan, tetapi untuk menentang kekuasaan elite politik desa, petani kaya yang mengatas namakan komunikasi tradisional demi mempertahankan institusi yang lebih menguntungkan mereka dan justru menghimpit petani miskin.

Petani melawan *hegemoni* negara karena petani pada dasarnya bersifat rasional. Mereka melawan bukan karena terusiknya norma-norma tradisional masyarakat petani, tetapi lebih disebabkan mereka tidak menguasai pasar. Dengan kata lain, petani melakukan perlawanan karena menyangkut tindakan kolektif dan pengambilan keputusan secara rasional. Petani merupakan pribadi-pribadi bebas yang ingin mengembangkan kreativitasnya secara rasional, mereka seperti manusia lain ingin kaya atas motivasi memperoleh keuntungan besar.

Sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat telah dikacaukan oleh penetrasi pasar. Pasarlah sebenarnya yang telah menggerogoti ikatan-ikatan ataupun legitimasi adat-istiadat dan hak-hak sosial tradisional masyarakat. Runtuhnya adat-istiadat atau erosi ikatan-ikatan tradisional hilangnya legitimasi dan hak-hak sosial tradisional, merosotnya ekonomi, disebabkan oleh tidak adanya organisasi yang mengakar kuat dalam

sistem ekonomi petani. Tujuan petani melakukan perlawanan adalah untuk mengejar inovasi dan keuntungan yang mengarah pada pengharapan hak milik pribadi atas alat-alat teknologi baru yang selama ini tidak dimiliki dirinya. Tujuan lain adalah pengharapan akan kemudahan dan penguasaan atas lembaga pasar subordinat lainnya. (Popkin:1986: 23)

Bagi popkin petani bukan sosok yang enggan dengan resiko, hanya saja petani ingin menjaga keseimbangan dalam komunitas sosialnya. Mengingat desa merupakan komunitas moral, petani tidak ingin interaksi sosialnya terganggu, mereka sangat rasional dalam mengambil keputusan individual dan berbagai interaksi strategis. Berkaitan dengan konsep protes yang dikemukakan oleh Scott, popkin mengomentari dengan pernyataan bahwa proses tindakan kolektif bergantung pada kemampuan kelompok atau kelas untuk mengorganisasi dan membuat tuntutan-tuntutan. Pergerakan merupakan suatu ekspresi dari cerminan suatu aktivitas petani untuk menumbuhkan dalam memperjuangkan hak-hak nya yang pernah ditolak. Perjuangan petani adalah untuk menjinakkan pasar dan birokrasi, bukan tindakan untuk memulihkan kembali sistem 'tradisionil' (popkin:1986: 29)

Olson (1971) dalam bukunya, *The logic of collective Action*, menyatakan bahwa seseorang melakukan gerakan karena dilandasi oleh pemikiran rasional atau atas dasar untung rugi dan manfaat bagi aktor.

alasan ini lebih bersifat rasional-ekonomi Olson sangat menekankan peran logika, dan kalkulasi *cost-benefit*. Bila hal ini dikaitkan dengan perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap peraturan daerah (perda) pada dasarnya tidak jauh berbeda mengingat perlawanan yang dilakukan berdasarkan untung-rugi. Dengan kata lain gerakan perlawanan pedagang kaki lima bermotivasi memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Menurut Olson seseorang akan melakukan tindakan kolektif selalu dilandasi argumen klasik tentang ada tidaknya keuntungan bagi dirinya, kecuali jika ada paksaan atau cara-cara yang memaksa individu bertindak menurut kepentingan bersama.

Untuk mengorganisir tindakan kolektif agar dapat berhasil, pimpinan dari suatu kelompok menyediakan insentif-insentif selektif, kecuali ada orang-orang yang mau menyumbang karena alasan *etika*, kesadaran. Sebab semua tindakan kolektif pada dasarnya dilakukan berdasarkan untung-rugi murni. Ketika orang-orang telah memutuskan untuk menyumbang dengan memberikan insentif-insentif etika, kesadaran, seorang pimpinan tidak perlu memberikan insentif-insentif selektif. Olson berpendapat bahwa orang mau berpartisipasi menyumbang sesuatu organisasi bila orang-orang tersebut yakin bahwa sumbangannya mendatangkan hasil paling baik (Olson dalam Popkin, 1986 :204)

Berdasarkan dengan insentif selektif untuk menstimulasi partisipasi, Olson (1986 :204) berpendapat bahwa tindakan itu tidak

diperlukan apabila keuntungan yang diperoleh dari tindakan kolektif tersebut dapat memberikan keuntungan jangka panjang secara riil. Dalam hal ini Olson mencontohkan sebuah tindakan gotong royong membunuh banteng yang mengganas di areal persawahan pembangunan sebuah tanggul yang akan melindungi petani.

Berdasarkan penjelasan Scott, Popkin, Olson perlawanan PKL di Alun-alun Kota Madiun dapat dijelaskan dengan terminologi Scott (1993:200) perlawanan PKL di Kota Madiun sebenarnya dikategorikan sebagai tindakan *everyday forms of resistance* akibat dari *everyday forms of repression* dengan berpedoman pada moral ekonomi mendahulukan selamat. Dalam hal ini Popkin (1986) menjelaskan peran penting PKL dalam melakukan perlawanan. Pedagang Kaki Lima sebagai tindakan pribadi-pribadi yang bebas mengembangkan kreativitas secara rasional dan berani menghadapi resiko, demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Konsep berani menghadapi resiko inilah yang tidak dijelaskan oleh Scott, sehingga penelitian ini perlu membutuhkan penjelasan dari Popkin.

Pedagang Kaki Lima (PKL) melawan hegemoni negara, karena negara tidak memberi ruang pasar kepada pedagang, ketika PKL ingin menguasai ruang yang bisa dijadikan pasar, pemerintah dan para patron menghalang-halangi dengan dalih penertiban, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Sedangkan Olson (1971) mengisi aspek tindakan kolektif yang dilakukan PKL. Sementara tindakan PKL melakukan perlawanan kepada Pemkot Madiun merupakan tindakan kolektif dan terorganisasi dengan

baik yang diwakili oleh organisasi/ paguyuban PKL . Tindakan PKL dalam melakukan perlawanan sangat terkait dengan peran logika dan kalkulasi cost-benefit. Pedagang Kaki Lima (PKL) mau melakukan perlawanan karena mengharapkan keuntungan yang besar. Tindakan kolektif PKL dalam konfrontasi dengan satpol PP kota Madiun dalam rangka menegakkan perda. Oleh karena itu dalam membahas penyebab mengapa PKL melakukan perlawanan. Maka digunakan tiga teori yaitu Scott, Popkin, Olson.

2.2.3. Tahap-tahap Terjadinya Perlawanan Pedagang Kaki Lima.

Suatu gerakan akan melewati serangkaian kondisi (1) *premovement stage* /tahap pra gerakan. (2) *awakening stage*/ tahap membangun kesadaran, (3) *movement building stage*.(4) *influence stage* / tahap mempengaruhi kelompok sasaran. (5) *outcome stage* / tahap pencapaian hasil, efek gerakan telah terlihat pada kebijakan.

A. Tahap Pragerakan (*premovement stage*)

Tahap ini muncul karena ada tekanan dan diskriminasi sosial, kondisi bersinergis dengan meningkatkan harapan, ketika harapan terus menerus meningkat suatu gerakan sosial akan menjadi berkembang. Kedua faktor tersebut baik tekanan maupun harapan yang meningkat , berkombinasi menghasilkan suatu pergerakan. Jadi tahap pergerakan adalah suatu tahap adanya tekanan struktur atau kondisi sosial yang tidak memuaskan, yang dialami oleh individu Kondisi ini mengarah

pada situasi tidak nyaman. Massa menjadi gelisah dan muncul kersahan. Inilah yang menyebabkan munculnya gerakan sosial.

Pada tahap ini beberapa individu dari pedagang kaki lima berkumpul dan mulai merasakan adanya tekanan struktur atau kondisi sosial yang tidak menyenangkan seperti kemiskinan, perbedaan kelas sosial, himpitan ekonomi dampak kenaikan BBM, kebencian sosial akan memicu terjadinya gerakan revolusioner. Dengan kondisi demikian pada diri individu pedagang mulai muncul kondisi tidak harmonis seperti issue-issue moral dan keadilan.

B. Tahap Membangun Kesadaran (*awakening stage*)

Pada tahap ini terjadi membangun kesadaran untuk melakukan ‘mobilisasi’, yaitu para pemimpin paguyuban pedagang kaki lima yang kharismatik dan proses resosialisasi. Dibutuhkan pemimpin untuk proses pengblengan individu-individu pedagang, sehingga mereka berani, tidak takut untuk melakukan langkah-langkah yang diarahkan pimpinannya dalam suatu gerakan perlawanan.

Menurut Baldrige (1983;313) “ *Leader are particular importan for galvanising social unres into an effective social movement. The soapbox orator, the quick-witted writer, the flaming preacher-these are the leaders who transorms many oppressed individuals into an organized social movement*”

Gerakan sosial selalu memiliki pemimpinnya, seperti Yasser Arafat, Hitler, Mao, Sukarno, dan Martin Luther King. Mereka membangkitkan pengikutnya untuk memperoleh dukungan dengan mengkristalkan kekusaran, kemarahan atas ketidak adilan untuk melakukan perlawanan

pada musuh. Pada kenyataannya pemimpin menjadi titik vokal dan puncak kulminasi dari gerakan sosial.

Pada tahap ini dibutuhkan upaya resosialisasi yaitu upaya membangun keyakinan seorang pemimpin atau kepercayaan diri yang memadai. Resoliasasi diperlukan karena mereka sebab kelompok terhimpit sering menerima begitu saja bahwa mereka lebih rendah, tidak berharga. Dengan demikian mereka mampu melakukan gerakan perlawanan karena tergugah atas kemampuan sendiri, membuang kesan negatif orang kecil.

C. Tahap Membangun Gerakan (*movement building stage*)

Pada tahap ini meliputi pengorganisasian gerakan, perumusan tujuan dan strategi mobilisasi aksi. Pada tahap ini diantara pedagang kaki lima saling mengenal dan membagi perasaam satu sama lain. Pada saat ini pemimpin gerakan mempunyai peranan sangat penting untuk mempengaruhi pedagang. meminta dukungan pihak lain yang simpati dengan perjuangan pedagang kaki lima. Pada tahap ini terjadi proses pengorganisasian dalam bentuk yang formal dan eksis, pemimpin jelas perilaku terstruktur, tujuan semakin konkrit, program kegiatan rutin.

D. Tahap Mempengaruhi Kelompok Sasaran.

Pada tahap ini diharapkan terbentuk semacam idiologi atau cita-cita perubahan. Aspek yang ditanankan untuk mempengaruhi kelompok sasaran adalah segala perubahan yang ingin dicapai oleh pedagang.

Kemudian dilakukan perekrutan atau pencarian anggota, simpatisan gerakan misalnya LSM, yang bersedia ikut mewujudkan cita-cita perubahan yang ingin dicapai. Pada tahap ini tugas gerakan adalah mengubah “publik lawan “ menjadi partisipan dan pendorong partisipan pasif menjadi kekuatan aktif.

E. Outcome Stage.

Pada tahap ini dilakukan pengkonsolidasian atau pelestarian hasil capaian. Fase ini akan muncul bila gerakan yang dilakukan berhasil dan mampu diintegrasikan dalam sejumlah struktur sosial dari masyarakat. Hasil dari gerakan ini dapat menjadi fenomena sosial di masyarakat yaitu perilaku kolektif oleh pedagang kaki lima (PKL).

2.2.4. Model-model Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Scott membagi perlawanan menjadi menjadi dua tipologi besar, yaitu perlawanan secara sungguh-sungguh dan perlawanan secara isidental.

Perlawanan isidental .(a) tidak terorganisir, tidak sistematis, (b) bersifat untung-untungan, dan berpamrih, (c)tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, (d) penyesuaian dengan sistem dominan yang ada.

Perlawanan sungguh-sungguh bersifat: (a) terorganisir, sistematis, kooperatif, (b) berprinsip atau tanpa pamrih.(c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) mengandung gagasan atau tujuan .(Scott, 1993:305)

Menurut Jackson (2001) perlawanan selalu berusaha strategi perlawanan bawah tanah dengan cara menghindari kewajiban, pura-pura sakit,

membolos kerja membalas pukulan mandor dengan pukulan dan tak melunasi kredit dengan melarikan diri dari lokasi perkebunan.

Model-model perlawanan pedagang kaki lima dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan terang-terangan / terbuka dan perlawanan sembunyi-sembunyi tertutup.

Perlawanan terang-terangan/terbuka adalah perlawanan dengan menggunakan fisik secara langsung tanpa basa-basi berhadapan dengan aparat satpol PP kota Madiun. Perlawanan tertutup adalah perlawanan non fisik dimana dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak terus terang, nggrundel, marah-marah tanpa fisik, rasan-rasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemkot.

2.2.5 Realitas Konflik dalam Masyarakat Perkotaan.

Salah satu kajian utama Sosiolog dengan teori struktural konsensus adalah bahwa jika masyarakat terjadi tidak setara maka manusia tidak hanya dihambat oleh norma-norma yang dipelajari melalui sosialisasi. Manusia juga dibatasi oleh kemudahan yang dia miliki oleh posisinya dalam struktur ketidak setaraan dalam masyarakat. Inilah yang menimbulkan benih-benih konflik dimasyarakat sebagaimana yang terjadi dalam perselisihan antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah Kota Madiun masalah perda pedagang.

Ada beragam struktur ketidak setaraan di masyarakat, kelompok pedagang kaki lima mungkin tidak setara, pedagang formal dan informal mungkin tidak setara, orang yang memiliki pekerjaan tetap mungkin

tidak setara, orang yang memiliki pekerjaan berbeda bisa tidak setara, orang yang berbeda agama dapat tidak setara dan lain-lain. (Pip Jones : 15).

Konflik yang ada pada umumnya berbasis adanya ketidaksetaraan dan berbagai macam kemudahan yang mereka anggap tidak setara. Teori-teori tersebut memiliki kesamaan *aksioma* bahwa asal-usul dan persistensi struktur ketidaksetaraan terletak pada dominasi atas kelompok-kelompok yang tidak beruntung oleh kelompok yang beruntung. Hal ini karena adanya konflik kepentingan yang tak terhindari antara orang yang mempunyai dengan orang yang tidak mempunyai, seperti dikatakan Wes Sharrock (1977) :

Pandangan konflik dibangun atas dasar asumsi bahwa setiap masyarakat dapat memberikan kehidupan baik luar biasa bagi sebagian orang, tetapi hal ini biasanya hanya mungkin karena orang tertindas dan ditekan Oleh sebab itu perbedaan kepentingan dalam masyarakat sama pentingnya adanya kesepakatan atas aturan dan nilai-nilai yang diikuti warga.

Menurut teori konflik, terdapat konflik kepentingan antara warga yang memiliki kemudahan dan yang tidak memiliki. Dimana konflik *inheren* dalam hubungan antara pedagang kaki lima dengan aparat satpol sebagai pelaksana perda pememerintah Kota Madiun. (Jones,2009 : 16).

Teori konflik berpendapat bahwa kita seharusnya melihat peranan aturan-aturan kebudayaan dan proses sosialisasi dalam cara yang sangat berbeda, penentu struktural sesungguhnya adalah ganjaran atau keuntungan yang dimiliki tidak setara oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.

Apabila ada kelompok dalam masyarakat tidak setara, satu-satunya cara agar tetap terpelihara adalah jika kelompok yang mengalami *deprivasi* tersebut menerima saja kondisi itu. Kadang-kadang penerimaan terjadi karena pihak yang berkuasa melakukan tindak-tanduk represif seperti teror dan kekerasan.

Penggunaan kekerasan oleh pihak penguasa (birokrasi) untuk mempertahankan keuntungannya yang tidak setara tidak perlu harus blak-blakan. Ada dua cara agar struktur yang tidak setara tersebut dapat dipelihara karena menjanjikan hasil yang menakutkan dari pada yang blak-blakan. *Pertama*, struktur itu dipelihara jika orang-orang yang tidak beruntung dicegah jangan sampai memandang dirinya mereka tidak beruntung atau dirugikan. *Kedua*, meskipun diakui mereka harus diiming-imingi bahwa kondisi tersebut cukup adil. Bahwasanya ketidaksetaraan itu benar, absah dan adil. Menurut pandangan teori konflik, hal ini terjadi melalui kontrol dan manipulasi norma-norma dan nilai-nilai-aturan kebudayaan- dimana orang sosialisasi. (Pip jones : 17).

Teori konflik menunjukkan pada kita bahwa dalam menguraikan aturan-aturan kebudayaan dalam suatu masyarakat, kita harus secara cermat mengkaji isinya. Kita seharusnya bertanya “ Siapa yang memperoleh keuntungan dari seperangkat aturan tertentu dalam masyarakat. Apakah kelompok tertentu tersebut memperoleh keuntungan lebih besar dari pada yang lain sebagai akibat dari kehadiran perangkat aturan tersebut..

Teori konflik mengatakan bahwa terjadinya proses disadari maupun tidak disadari, para penguasa dalam banyak masyarakat dunia masa kini menggunakan propaganda secara semena-mena dengan membujuk pihak-pihak yang dikuasai untuk legitimasi tatanan ini. Mereka juga sering kali mengontrol dan menyensor media massa di negara mereka untuk mencegah menguatnya oposisi terhadap sosialisasi terkendali itu. (Pip Jones : 18).

Penggunaan kekuasaan itu bisa pula secara tak semena-mena, misalnya ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita. Juga terjadi ketidaksetaraan tersebut terlihat pada sosial ekonomi pedagang informal dengan pedagang formal dan pegawai birokrasi di pemerintahan. Para pedagang informal mati-matian mencari sesuap nasi dengan modal yang dimilikinya, tidak mengenal panas dingin, hujan bahkan dikejar-kejar oleh aparat satpol dipihak lain para pejabat, birokrasi, anggota DPR, DPRD enak-enakan menikmati uang rakyat tanpa kerja keras, bahkan kadang-kadang makan uang rakyat tanpa ingat mereka yang susah.

Ada dua landasan premis tentang teori struktural konflik (Pip Jones:17) yaitu :

- a. Struktur sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan yang tidak setara. Kepentingan-kepentingan dari kelompok ini dalam keadaan konflik satu dengan lainnya, karena

ketidak setaraan itu dihasilkan dari dominasi dan eksploitasi kelompok yang beruntung terhadap kelompok yang tidak beruntung.

- b. Keteraturan sosial dalam masyarakat tersebut dipertahankan dengan menggunakan kekuatan, baik dengan kekuatan paksaan maupun kekuatan melalui sosialisasi.

Teori konflik menaruh perhatian besar pada konflik terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya ketidak setaraan, sebenarnya isi kebudayaan sebagai cara untuk mengekalkan hubungan ketidak setaraan antara manusia. Konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah Kota Madiun salah satunya disebabkan adanya ketidak setaraan sosial ekonomi sebagai pemicunya. Andaikan tidak ada kesenjangan sosial ekonomi diantara mereka, kemungkinan perselisihan tersebut tidak terjadi, karena semua penyebabnya masalah “ Perut “.

Teori konflik muncul sebagai reaksi atas teori struktural fungsional yang kurang memperhatikan konflik yang terjadi di masyarakat. Teori Konflik adalah salah satu perspektif dalam ilmu Sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai macam komponen. Komponen-komponen tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dimana komponen yang satu berusaha menaklukan lainnya guna memenuhi kepentingan sebesar-besarnya.

Pada dasarnya pandangan teori konflik terhadap masyarakat tidak banyak berbeda dengan teori fungsional struktural, karena keduanya memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai

macam komponen. Perbedaan mereka terletak pada asumsi mereka tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat. Menurut teori konflik, elemen-elemen tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga berjuang untuk saling mengalahkan satu sama lain guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebagai contoh teori Konflik yaitu terjadinya perselisihan antara elemen-elemen dalam masyarakat seperti antara pedagang kaki lima (PKL) dengan aparat satpol atas nama pemerintah kota. Mereka mempunyai kepentingan yang berbeda dan berkeinginan semua keinginan terpenuhi, contoh pemkot Madiun mempunyai tujuan agar Pedagang Kaki Lima (PKL) tertib, teratur, jam jualan tertib, lokasi bersih, sehat, indah. Sedangkan pedagang ingin tetap dapat jualan 24 jam, dagangannya terjual dapat uang, dapat memenuhi kebutuhan anak, isteri, sekolahnya. Perbedaan kepentingannya antara pedagang kaki lima dan pemkot tersebut menimbulkan konflik, yakni terjadinya perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan waktu jualan dengan berbagai cara.

Hakekat kenyataan sosial konflik adalah bahwa antara elemen sosial terjadi perselisihan. Menurut Karl Max, konflik adalah pertentangan antara segmen sosial untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis konflik beraneka macam seperti antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemkot Madiun, antara suporter sepak bola bonek

Surabaya dengan Pasopati Solo, antara penganut Syi'ah dengan santri NU di kabupaten Sampang Madura Jawa Timur .

Di bawah ini teori konflik yang mendasari dalam penelitian ini, adalah teori Konflik makrokospis Ralp Dahrendorf dimana selaras dengan paradigma fakta sosial. Ralf Dahrendorf dengan teori Konflik dialektika nya berpendapat bahwa dalam masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. (Raho,2007: 87). Kita tidak mungkin mengalami konflik bila sebelumnya tidak ada konsensus, konflik dapat menghantar orang pada konsensus. Dahrendorf mengemukakan dalam tesisnya bahwa distribusi kekuasaan atau otoritas yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan terjadinya konflik sosial yang sistematis, bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan berbeda-beda. Kadang kala orang sangat berkuasa dan mempunyai otoritas tinggi dan ada yang cuma sedikit otoritas / kekuasaan. Otoritas tidak didapat didalam intrinsik pribadi-pribadi melainkan ada dalam posisi yang mereka tempati.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau rakyat kecil. Mereka menduduki posisi sebagai penguasa atau atasan, diharapkan untuk mengontrol orang-orang yang dikuasai atau bawahan. Dengan demikian orang menjadi penguasa bukan karena tipe kepribadiannya melainkan karena masyarakat mengharapakan demikian. Oleh karena itu kekuasaan

adalah sesuatu yang sah maka sah pula sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melawan kekuasaan. (Raho, 2007: 90).

Menurut Dahrendorf, otoritas atau kekuasaan didalam suatu masyarakat bersifat dialektika. Dalam setiap masyarakat hanya ada dua kelompok yang bertentangan yaitu kelompok penguasa (yang sedang berkuasa, atasan) dan kelompok yang dikuasai (rakyat). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan menurut Ralph Dahrendorf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok atas ingin tetap mempertahankan status quo nya sedangkan yang berada di kelompok bawah, ingin ada perubahan.

Otoritas, bukanlah sesuatu yang bersifat konstan, karena otoritas terletak pada posisi bukan pada orang. Seseorang memegang sesuatu *setting* tidak berarti menduduki posisi sebagai pemegang otoritas bearti tidak menduduki posisi sebagai pemegang otoritas pada *setting* lain. Senada dengan hal tersebut seseorang pada posisi subordinat dalam suatu kelompok bisa jadi menjadi pada posisi superordinat dalam kelompok lain. Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit yang disebut dengan *assosiasi* yang ditata berdasarkan perintah. Semua itu dapat dilihat dari *assosiasi* orang yang oleh hiraerkhis posisi otoritas, karena didalam masyarakat terdapat banyak *assosiasi*, individu dapat memegang otoritas pada suatu *assosiasi* dan pada subordinat pada posisi lain.

Otoritas dalam *assosiasi* bersifat dikotomis dua, dan hanya ada dua posisi kelompok konflik dapat terjadi dalam *assosiasi*. Mereka memegang otoritas dan pada posisi subordinat memiliki kepentingan yang “ substansi dan arahnya berlawanan”. Menurut teori konflik Dahrendorf ada unsur “ kepentingan” dalam kelompok yang berada di puncak dan dibawah ditentukan oleh kepentingan bersama. Menurut Dahrendorf kepentingan kelompok dalam masyarakat bersifat psikologis sebagai berikut :

Untuk tujuan analisis sosiologis atas kelompok konflik dan konflik kelompok, perlu diasumsikan adanya orientasi tindakan yang terbentuk secara struktural dari pihak yang menduduki posisi tertentu. Dengan menggunakan analogi orientasi tindakan sadar maka tidak salah jika kita menyebutnya dengan ada kepentingan. asumsi kepentingan obyektif yang diassosiasikan dengan posisi sosial tidak mengandung implikasi psikologis atau akibat yang rumit ia sepenuhnya berada pada level analisis sosiologis. (Dahrendorf, 1959:175)

Dalam setiap *assosiasi*, seseorang berada pada posisi dominan berusaha mempertahankan status quo sementara yang berada pada posisi subordinat berusaha melakukan perubahan. Konflik kepentingan dalam masyarakat apapun bersifat laten sepanjang waktu, dan ini merupakan legitimasi otoritas selalu berada pada posisi rawan. Konflik kepentingan ini tidak harus berlangsung secara sadar sebelum mampu mengerakkan superordinat dan subordinat. Kepentingan subordinat dan superordinat bersifat obyektif dalam pengertian tercermin pada harapan-harapan/peran yang melekat pada posisi tersebut. Individu tersebut tidak harus menginternalisasikan harapan-harapan ini atau menyadarinya agar

bertindak berdasarkanannya. Jika mereka menduduki posisi-posisi tersebut, diharapkan mereka bertindak sebagaimana diharapkan individu disesuaikan atau diadaptasikan pada peran yang melekat pada peran mereka ketika menyumbang konflik antara superordinat dan subordinat. Dahrendorf menyebut harapan-harapan ini kepentingan laten. Dan kepentingan yang telah disadari dengan kepentingan manifes. Dahrendorf melihat analisis hubungan antara kepentingan laten dan kepentingan manifest sebagai tugas utama teori konflik.

Dalam konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dengan satpol PP mewakili pemerintah kota Madiun, terjadi konflik kepentingan berupa perlawanan pedagang terhadap diterapkannya perda Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam kegiatan sosial ekonomi di kawasan Alun-alun Kota Madiun. Pemerintah kota Madiun sebagai pihak superordinat memaksakan perda terhadap pihak subordinat dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL), pemerintah kota berharap dengan harapan-harapan sadar bahwa pedagang mentaati perda. Sedangkan pedagang kaki lima (PKL) menolak mentaati perda karena tidak sesuai dengan harapan-harapannya yaitu dapat jualan sepanjang 24 jam dalam sehari. Disinilah pokok masalahnya bahwa hubungan analisis antara kepentingann laten dan manifes tidak dapat memenuhi kepentingan mereka.

2.2.6 Kelompok, Konflik dan Perubahan.

Dahrendorf mmembedakan tiga tipe besar kelompok, pertama yaitu kelompok semu atau sekumpulan orang menduduki posisi dengan

kepentingan peran identik (Dahrendorf, 1959 ; 180) Kedua kelompok kepentingan, yaitu :

Model perilaku bersama menjadi ciri dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok memiliki tujuan tertentu, sedangkan mereka agen sesungguhnya dari kelompok konflik yang memiliki struktur, bentuk organisasi, program, atau tujuan dan personel anggota.

(Dahrendorf, 1959 ; 180)

Kelompok konflik, atau kelompok yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut. Dahrendorf, beranggapan bahwa konsep kepentingan laten dan manifes, kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik adalah dasar bagi penjelasan konflik sosial. Menurut Dahrendorf, kelompok-kelompok muncul, mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan dalam struktur sosial. Tatkala konflik makin intens perubahan akan terjadi bersifat radikal, tetapi bila konflik intens tersebut disertai kekerasan perubahan struktural terjadi tiba-tiba. Jadi apapun sifat dasar konflik, harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan maupun konflik dengan status quo.

Dalam suatu masyarakat, konflik dapat menyeret individu yang biasanya terisolasi ke dalam peran aktif. Konflik juga memainkan peran komunikatif, sebelum terjadi konflik beberapa kelompok mungkin tidak yakin akan posisi lawan, namun akibat dari konflik posisi dan batas-batas antara kelompok sering kali menjadi jelas. Dengan demikian individu lebih mampu memutuskan tindakan tepat dalam hubungan dengan

lawannya. Konflik juga memungkinkan berbagai pihak memperoleh gagasan yang lebih baik tentang kekuatan mereka dan mungkin juga meningkatkan persahabatan atau akomodasi secara damai.

Konflik pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah Kota Madiun dalam aksi perlawanan pedagang terhadap perda Pedagang Kaki Lima (PKL) membawa berkah adanya perhatian pemerintah daerah kepada pedagang informal, khususnya yang berada di kawasan Alun-alun Madiun. Hal tersebut terbukti dengan adanya pertemuan mediasi antara pedagang kaki lima dengan wali kota dan jajarannya untuk mencari solusi terhadap perlawanan pedagang atas perda. Dan pada Januari 2013 wali kota bertemu dengan seluruh pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun silaturahmi dan memberi penjelasan tentang adanya issue-issue rencana penggusuran pedagang di Alun-alun Kota yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mengingat 3 bulan lagi ada pilkada di Kota Madiun. Dengan adanya pertemuannya tersebut terjadilah komunikasi dan silaturahmi antara pemkot Madiun dan pedagang, kondisi sosial politik menjadi stabil.

Konflik selalu ada dalam setiap kehidupan bersama atau perkumpulan atau negara, walau mungkin secara tersembunyi. Ini berarti bahwa legitimasi itu tidak bersifat tetap, melainkan berubah sesuai mandat rakyat.(Raho,2007). Ralph Dahrendorf menjelaskan bahwa ada hubungan antara konflik dan perubahan sosial. Menurut dia konflik berfungsi menciptakan perubahan dan perkembangan. Menurut

Dahrendorf, bahwa kelompok-kelompok yang bertentangan muncul ke arah konflik, bila mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi dengan tiba-tiba.(Raho, 2007: 78).

Dalam perlawanan pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah Kota Madiun tentang masalah penataan jam jualan berdagang merupakan konflik antara penguasa (pemerintah) dengan pedagang kaki lima (yang dikuasai.). Pemerintah selaku pihak yang berkuasa ingin menerapkan segala peraturan yang dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan, kebersihan, aman damai di Kota Madiun. Sedangkan pedagang ingin dapat hidup, makan minum, hidup layak. Menurut Ralph Dahrendorf hakekatnya dalam masyarakat terdapat dua kelompok yang bertentangan penguasa dan yang dikuasai, mereka harus dipertemukan untuk menyamakan kepentingan. Konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan, kelompok yang bertentangan muncul, maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan sosial yang terarah pada perubahan sosial. (Raho,2007 :80).

Perubahan sosial yang terjadi diantaranya terciptanya konsensus tentang jam/lokasi jualan yang tepat bagi pedagang kaki lima, untuk berdagang sesuai dengan peraturan daerah yaitu Perda No.8 2003 yang mengatur penataan waktu, tempat usaha dan pembinaan PKL. Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan penataan

jam dan tempat jualan oleh pemerintah Kota merupakan ungkapan konflik antara pihak penguasa dengan pihak yang tidak berkuasa. Konflik tersebut lahir karena kepentingan mereka tidak terakomodasi dengan baik. Pedagang tidak dapat berjualan sebagaimana keinginannya yaitu sepanjang hari/malam 24 jam. Shift 3 kali dengan durasi waktu 8 terus menerus di lingkungan Alun-alun Kota Madiun tidak dapat dilaksanakan lagi. Pemerintah ingin menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan agar ada waktu jeda bagi petugas Dinas Kebersihan Kota (DKP) untuk melaksanakan tugasnya, sehingga pagi mulai jam 06.00 sampai jam 12.00 Alun-alun Kota harus *steril* dari pedagang kaki lima. Disamping itu juga untuk mewujudkan Madiun Kota bersih, sehat, aman, indah nyaman, dan Alun-alun sebagai sarana rekreasi keluarga.

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk kelompok *marginal* yang secara sosial, ekonomi, dan politik terpinggiran oleh kebijakan pemerintah. Mereka dianggap sebagai pembuat keonaran, kekumuhan, lingkungan kotor, tidak taat hukum dan mencipta keruwetan lalu.lintas maka kebijakan sosial ekonomi tidak berpihak pada mereka. Sebenarnya para pedagang hanya membutuhkan tempat untuk dapat berjualan, agar dapat makan, minum, mencari nafkah, tetapi selalu keinginannya tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Akhirnya yang terjadi antara keinginan dan kenyataan kontradiktif di lapangan dan terjadilah perlawanan pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah. dalam masalah penataan lokasi dan jam jualan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pihak yang tidak berkuasa dan bermodal pas-pas an, berharap dapat mencari nafkah sekedar untuk menambal hidup dia dan keluarga harus berhadapan dengan penguasa. Yang terjadi adalah konflik terbuka dengan perlawanan semampunya antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemerintah. Untuk melampiaskan ego-nya masing-masing. Semoga dengan adanya perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap perda penataan pedagang kaki lima akan memunculkan *solusi* dalam menyusun perda baru tentang penataan pedagang kaki lima di Alun-alun Kota Madiun

2.2.7 Potensi Konflik Hubungan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemerintah Kota Madiun.

Pola hubungan konflik lebih menekankan pada konflik yang berlangsung bilamana terjadi interaksi sosial antara pedagang kaki lima (PKL) dengan aparat satpol PP dalam aktifitas yang berbeda. Masalah konflik antara pedagang kaki lima dengan aparat satpol PP merupakan adanya perbedaan persepsi dalam mengartikan sebuah kebijakan dan bukan masalah sentimen antara pedagang kaki lima dengan Pemkot Madiun khususnya satpol PP. Gesekan- gesekan antara pedagang kaki lima dengan aparat sering terjadi karena berbeda dalam memahami isi dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemkot. Pemkot bermaksud menata lingkungan Alun-alun kota dengan perda yang mengarah ke ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan, suasana indah, bersih

dalam rangka adipura. Sedangkan bagi pedagang yang penting dapat mencari nafkah dengan jualan, tanpa menghiraukan isi perda.

Konflik pedagang dengan aparat satpol PP Pemkot di alun-alun, bukan masalah sosial politik, kelompok, suku, agama, sektarian, tetapi permasalahannya sebenarnya sosial ekonomi semata. Pedagang kaki lima (PKL) butuh makan, butuh sesuap nasi, butuh hidup dengan berjualan sebagai pedagang di alun-alun Kota Madiun, sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini satpol PP bersikeras tetap menjalankan tugas sebagai instansi untuk mengamankan kebijakan perda yang ada. Konflik diantara mereka lebih banyak disebabkan oleh perbedaan menafsirkan isi perda menurut diri mereka sendiri.

Dalam masyarakat di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, masalah sosial ekonomi menjadi sesuatu hal yang mendasar bagi hidup dan kehidupan. Kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin dan adanya globalisasi semakin membuat jurang ekonomi si kaya si miskin menjadi lebar.

Munculnya neo liberalisme, model pengelolaan ekonomi kapitalisme menjadikan masyarakat berkemampuan ekonomi rendah sulit untuk bersaing, dan berkembang bahkan semakin terpuruk dan gulung tikar. Harga bahan bakar minyak semakin tinggi berakibat pada banyaknya pabrik-pabrik tutup, investor asing lari ke luar Indonesia dan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya peristiwa tersebut muncullah

pedagang informal sebagai pelarian terakhir untuk dapat menyambung nyawa (hidup).

Semakin tumbuhnya pedagang sektor informal menjadikan tempat strategis di kota menjadi sasaran untuk lokasi jualan, sehingga berakibat tidak teraturnya kota dan menimbulkan pemandangan tidak indah, kotor, semrawut, tidak sehat.

Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik antara satpol PP dengan pedagang. Collins mengemukakan bahwa konflik bukan merupakan masalah ideologi, namun konflik merupakan satu-satunya proses utama dalam kehidupan sosial. (Ritzer : 2009 : 286)

2.2.8 Elemen dasar Teori Konflik.

Menurut Johnson (1986 : 252), salah satu ahli terkemuka yang mempelajari proses interaksi sosial di tingkat mikro adalah George Simmel. Pemikiran Simmel tentang masyarakat dikemukakan sebagai berikut “ bahwa masyarakat lebih dari pada hanya sekedar suatu perkumpulan individu serta pola perilakunya, namun masyarakat tidak *independent* dari individu yang membentuknya. Sebaliknya masyarakat menunjuk pada pola-pola interaksi timbal balik antar individu.

Sosiasi (*sociation*), yang sederhana berarti proses dimana masyarakat itu terjadi, meliputi interaksi timbal balik. Melalui proses ini individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga masyarakat itu muncul. Menurut Simmel pra kondisi keberadaan masyarakat adalah kesadaran pada sebagian individu yang menyatakan

bahwa mereka itu terikat individu lainnya. Pola perilaku universal dan berulang-ulang melalui mana berbagai isi diungkap. Isi kehidupan sosial mencakup anantara lain naluri erotis, kepentingan obyektif, dorongan keagamaan, bantuan atau perintah. Keseluruhan ini menurut Simmel menyebabkan orang lain hidup bersama orang lain, bertindak terhadap mereka mempengaruhi dan dipengaruhi mereka, bahkan melawan mereka. (Jonhson : 1986 : 258)

Salah satu pernyataan Simmel tentang konflik sosial tampak dari kecenderungan untuk lebih memusatkan perhatian pada konsekuensi konflik bagi keberlangsungan perubahan sosial. Seperti yang pernah dikatakan :

“ Conflict is thus designed to resolve dualisme, it is a way of achieving Some kind of unity, even if it through the annihilation of one conflictin paties. This is roughly parallel to the fact that it is the most violent symptom of a disease which represenrs the of the organism to free it self of disturbances of damage caused by them” (simmel 1956 : 13)

Berdasarkan pengamatan dan sejarah konflik sosial. Simmel mengembangkan sejumlah proposisi. Dalam rangkaian proposisinya Simmel menegaskan konflik sebagai suatu *variable* yang menampilkan derajat intensitas interaksi. Karena itu kompetisi dan pertarungan pun dia simpulkan sebagai ujung ekstrim dari kontinum interaksi sosial (Turner, 1986:140).

Berkenaan dengan konflik sosial, Simmel mengembangkan tiga perangkat proposisi tentang intensitas politik, fungsi konflik bagi pihak

yang terlibat dan fungsi konflik bagi sistem keseluruhan. Dalam perangkat proposisi tentang intensitas konflik, Simmel mengatakan bahwa semakin tinggi derajat keterlibatan emosional pihak yang terlibat dalam suatu konflik, maka semakin kuat kecenderungan untuk mengarah kekerasan. Dalam konteks ini ada korelasi positif antara solidaritas antar anggota dalam suatu kelompok konflik dengan derajat emosional. Demikian pula ada korelasi positif antara harmoni awal antar anggota kelompok bertikai dengan derajat keterlibatan kelompok emosional mereka.

Selanjutnya, semakin tinggi suatu konflik dipandang oleh para anggota kelompok bertikai telah merintang pencapaian tujuan dan kepentingan individu, maka konflik cenderung menjadi kekerasan. Akhirnya suatu konflik dipandang sebagai cara untuk pencapaian tujuan yang jelas, maka semakin tinggi kemungkinan-kemungkinan konflik tersebut menjadi kekerasan. (Turner: 1989:141).

Bila proposisi ini diterapkan pada konflik antara pedagang kaki lima (PKL) maka diduga kuat faktor solidaritas menjadi penyebab utama perlawanan pedagang terhadap pemerintah Kota Madiun. Pada gilirannya solidaritas kelompok merupakan faktor penyebab terjadi perlawanan pedagang, secara praktis solidaritas antar pedagang dapat digunakan untuk menentang peraturan berjualan yang tidak disetujui, yang bila ini mengental berakibat konflik pada bentuk-bentuk kekerasan.

Fungsi konflik bagi masing-masing kelompok, menurut George Simmel menegaskan bahwa semakin suatu konflik menjadi bentuk-bentuk kekerasan, maka semakin meningkat derajat solidaritas internal dalam masing-masing kelompok. Fungsi konflik menjadi salah satu gagasan yang pada perkembangan selanjutnya mempengaruhi konflik sosial antara pedagang kaki lima dengan aparat sat pol PP di Alun-alun Kota Madiun. Diduga kuat bahwa intensitas konflik semakin kuat disebabkan adanya solidaritas sesama pedagang yang kuat pula dan adanya tindakan represif aparat yang tinggi.

Berkenaan dengan proposisi tentang fungsi konflik terhadap keseluruhan sistem sosial, Simmel mengemukakan bahwa : (1) semakin rendah derajat kekerasan suatu konflik, maka semakin besar kemungkinan konflik tersebut mengarah pada integrasi keseluruhan sistem. (2) semakin tinggi derajat konflik kekerasan dan makin lama suatu konflik antar kelompok terjadi, maka semakin terjadi koalisi kelompok yang sebelumnya tidak terkait dalam kelompok tersebut. (3) semakin lama ancaman konflik kekerasan antar kelompok berlangsung, maka semakin bertahan koalisi dari masing-masing kelompok yang terlibat. Konflik.

Menurut Simmel bahwa konflik yang keras akan menurunkan ketegangan dan munculnya terhadap stabilitas sistem sosial. Karena itu konflik sosial sudah dirancang untuk memecahkan dilema dualisme. Konflik merupakan suatu cara untuk mencapai kesatuan, walaupun

dirancang dengan menghilangkan salah satu pihak yang bertikai. Konflik sosial dibaratkan sebagai gejala-gejala suatu penyakit yang sebenarnya malah menunjukkan terjadinya usaha dari suatu organisme untuk membebaskan diri dari gangguan dan kehancuran yang disebabkan oleh penyakit tersebut.

BAB. III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi sumber dari perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Mengetahui model-model perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun.
3. Mengetahui dampak yang diakibatkan oleh model-model perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sarana memperkuat atau setidaknya melengkapi pandangan dan teori-teori perlawanan rakyat dan teori konflik, berkaitan dengan masalah konflik sosial.
 - b. Sebagai sarana menemukan konsep-konsep baru yang berkaitan dengan pola-pola perlawanan dan konflik sosial di masyarakat.
2. Secara Praktis.
 - a. Mencari pemecahan penyebab terjadinya perlawanan pedagang kaki lima di Kota Madiun dengan dilaksanakannya kebijakan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).
 - b. Menciptakan hubungan yang membangun baik antara pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemerintah kota Madiun.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertolak pada asumsi bahwa model-model perlawanan pedagang kaki lima (PKL) yang variatif pada momentum penertiban, penataan sebagai pelaksanaan Perda No 8 Tahun 2003 merupakan model-model ekspresi kekecewaan terhadap tindakan aparat satpol PP yang cenderung represif dan subyektif. Sehingga tindakan perlawanan pedagang mengandung makna mendalam dan pertimbangan tersebut berbeda untuk masing-masing individu. Karena itu mengkaji model-model perlawanan pedagang kaki lima dan perilaku sosial menentang kebijakan pemkot Madiun membutuhkan beberapa perangkat teori sebagaimana tersebut di atas yaitu, teori perlawanan, dan teori Konflik.

Paradigma fakta sosial, melihat bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor eksternal yang sifatnya memaksa dan mengendalikan individu. Sementara itu paradigma definisi sosial menekankan pada tindakan makna subyektif. Sedangkan paradigma perilaku sosial menekankan pada kondisi *reinforcement*. Perilaku pedagang Kaki Lima (PKL) akan berulang dan senantiasa melakukan perlawanan dengan berbagai model terhadap tindakan yang bermuatan ketidakadilan, merugikan secara ekonomi, tindakan represif atas aktifitas berdagang di sekitar Alun-alun Kota Madiun. Sebaliknya perilaku akan tidak bernuansa konfrontatif dengan aparat satpol PP ketika mendapat perlakuan yang manusiawi, persuasif penuh keadilan, dan tidak diskriminatif. Secara khusus dapat dikatakan bahwa perilaku sosial konfrontatif

pedagang kaki lima terhadap aparat satpol PP sangat tergantung pada perlakuan pemerintah Kota kepada pedagang terkait dengan isi perda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagaimana yang ada pada teori Konflik dan teori perlawanan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dikatakan bahwa model-model perlawanan oleh pedagang kaki lima (PKL) merupakan fakta sosial yang tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perlawanan pedagang, merupakan hasil dari akumulasi kekecewaan, sakit hati, ketidakpuasan, dan tindakan represif aparat satpol PP. Dalam pandangan *Behavioris* lazim disebut sebagai faktor stimulus. Sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalisasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebagaimana mereka melihat kejadian perlawanan Pedagang di tempat lain.

Beberapa *variable* dalam penelitian ini diasumsikan sebagai stimulus yang dapat mempengaruhi perilaku sosial pedagang yang konfrontatif pada aparat satpol PP. yaitu perlawanan pedagang kaki lima kepada aparat. *Variable* tersebut adalah identifikasi perlawanan pedagang, isu-isu kebijakan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), model-model perlawanan, dan tindakan yang dilakukan satpol PP Kota Madiun.

Oleh karena itu model perlawanan pedagang kaki lima bervariasi dalam menanggapi penerapan kebijakan memiliki tujuan tertentu. Maka pedagang dalam merespon berbagai stimulus yang dapat mempengaruhi

perilaku sosialnya mulai beberapa proses. Proses tersebut mulai dari tindakan yang tidak setuju, marah, protes, demonstrasi, mogok, sembunyi-sembunyi, sakit hati, grundel sampai pada perilaku sosial yang negatif yaitu perlawanan sebagai tindakan melawan kebijakan tentang pedagang di kawasan Alun-alun Kota Madiun.

BAB IV METODE PENELITIAN

3.1 . Rancangan Penelitian.

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Dengan pendekatan tersebut dapat diperoleh data realistis berkaitan tentang pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai fakta-fakta sosial.

Paradigma definisi sosial cenderung mempergunakan metode observasi dan *interview* dalam penelitiannya. Walaupun kedua metode tersebut sebenarnya bukan monopoli paradigma ini. Metode observasi cocok untuk studi definisi sosial. Alasannya karena sebagian besar dari definisi sosial merupakan sesuatu yang dianggap sebagai suatu obyek.

3.2.1 Ruang Lingkup Penelitian.

Studi ini dibatasi pada model-model perlawanan pedagang kaki lima dikawasan alun-alun kota Madiun.

Ruang lingkup penelitian ini secara terperinci membahas , (1) fenomena yang mendorong timbulnya perlawanan yang dilakukan oleh pedagang di perkotaan. (2) proses terjadinya perlawanan pedagang kaki lima/PKL.(3) model-model perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di perkotaan. (4) tujuan serta dampak perlawanan PKL di perkotaan.

Alasan peneliti mengambil kajian perlawanan pedagang kaki lima perkotaan antara lain : *pertama*, sebgaaian besar kegiatan sektor informal

di perkotaan berlangsung dalam bentuk pedagang kaki lima / PKL.

kedua, perkembangan pedagang kaki lima / PKL. Khususnya pasca krisis ekonomi berlangsung sangat cepat. *Ketiga* keberadaan pedagang kaki lima merupakan sebuah paradoks. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima dibutuhkan karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan kebutuhan murah bagi warga kota yang berpenghasilan rendah. Namun kehadiran pedagang kaki lima/PKL disisi lain menciptakan kesemrawutan, kekumuhan ketidaktertibann kota Madiun. *keempat*. mencermati keunikan dan perkembangan perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima di perkotaan.

3.2.2 Setting dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Alun-alun Kota Madiun yang menjadi target operasi penertiban pedagang kaki lima/PKL. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke alun-alun kota, baik pada siang, sore atau malam hari sambil menikmati dan berbelanja di alun2 serta berbagai strategi untuk mengakrabkan antara peneliti dan pembeli. Keputusan untuk memilih lokasi ini dilakukan karena lima alasan, (1) kawasan ini merupakan kawasan tempat orang, keluarga berkumpul merupakan lokasi hiburan, lokasi santai orang dan sangat strategis. dilewati semua orang dan kendaraan dari pusat kota ke arah Magetan. (2) lokasi ini merupakan lokasi yang selalu ditertibkan, dimana pada pada saat dilakukan penertiban terjadi perlawanan pedagang kaki lima / /PKL baik terang-terangan maupun tersembunyi selalu terjadi.

(3) lokasi ini sangat strategis karena terletak di pusat kota dan pendopo kabupaten Madiun, dan pusat kegiatan upacara hari besar nasional.

(4) daerah alun-alun menjadi tempat pusat hiburan dan rekreasi dengan dibangunnya Madiun Square areal terbesar rekreasi di kota Madiun.

3.2.3 Penentuan Subyek Penelitian.

Untuk menentukan subyek penelitian yang baik setidaknya-tidaknya ada beberapa persyaratan, antara lain, (a) mereka sudah lama terlibat menekuni profesi tersebut sebagai pekerjaan, sehingga menjadi kajian penelitian. (b) mereka terlibat penuh dalam bidang perdagangan /PKL. (c) mereka mempunyai waktu cukup untuk dimintai informasi tentang kegiatan pedagang kaki lima /PKL, khususnya di kawasan alun-alun.

Atas dasar pertimbangan syarat tersebut diatas, dalam penelitian ini pihak-pihak yang dapat dijadikan subyek adalah aktor pedagang kaki lima/PKL Madiun yang benar-benar pernah terlibat dalam gerakan perlawanan, dan bila ditabulasikan karakteristik nya sebagai berikut :

Tabel 3.1

Karakteristik Subyek Penelitian

Karakteristik	!	jumlah	!	Keterangan
PKL di alun-alun	!	25 orang	!	variasi dagangan
Ketua paguyuban PKL	!	5 orang	!	khusus di alun-alun
Pejabat pemerintah	!	3 0rang	!	!satpol PP, indag, UMKM
Camat	!	1 orang	!	! camat Manguharjo
Lurah	!	2 orang	!	! Pandean. Pangongangan

Tim Trantib	!	3 orang	! koramil, polsek, satpol PP
Petugas sat pol PP	!	4 orang	! Satpol PP kota
LSM	!	4 orang	! BEM, LBH, IPKL, IKM
Ketua RT/RW	!	4 orang	! Pandean, Manguharjo
Pejalan Kaki	!	8 orang	!Jl. alun utara, alun barat

Subyek penelitian yang menjadi *key informan* meliputi tokoh pedagang Kadispol PP, Kadisperindag, kadis DKP dan Kadisperta kota Madiun.

3.2.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data pengamatan data wawancara, data dokumentasi. Fokus pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap 3 komponen utama, yaitu *space* (ruang, tempat) *aktor* (pelaku), *activity* (kegiatan). Selama penelitian berlangsung, peneliti memposisikan diri sebagai *human instrument* yang meluangkan waktu banyak di lapangan. Langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu untuk mendapatkan kemurnian fenomena adalah sebagai berikut :

Pertama, melakukan pendekatan kepada PKL dengan berbagai cara. dalam proses pendekatan ini, peneliti selalu berusaha hadir di tengah-tengah pedagang baik, ketika mereka berjualan maupun pada waktu demonstrasi. Pengumpulan data dimulai pada saat memusatkan fokus pada kegiatan observasi secara terus-menerus yaitu mengamati terus menerus berbagai aktivitas sosial dengan cara membuka mata, telinga lebar-lebar pada beberapa kasus. Tempat, dan waktu yang berbeda

Dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pedagang kaki lima/PKL Subyek penelitian untuk mengungkapka pengalaman-pengalamnya .

Data yang diperoleh dari observasi langsung berupa perincian atau data deskriptif tentang perilaku, orientasi, tindakan orang-orang serta keseluruhan kemungkinan hubungan bermakna dari interaksi inter personal yang terlibat dalam kegiatan pedagang kaki lima.

Setelah berhasil menjalin hubungan dengan pedagang kaki lima, barulah secara bertahap peneliti memasuki penggalian fenomena penelitian.

Proses berikutnya adalah wawancara pada saat berbelanja, membeli makanan, minuman, sendau gurau, rekreasi di alun-alun kota Madiun. Mereka senang sekali dan mudah sekali dimintai keterangan apabila posisi mereka telah akrab dan telah dianggap sebagai teman curhat, tempat untuk sampaikan isi hatinya. Pedagang kaki lima bahkan tidak segan-segan untuk mengungkapkan berbagai tindakan represif satpol PP, Tim gabungan penertiban pedagang yang telah pedagang rasakan selama ini.

Lebih-lebih bersedia membeli makanan dan minuman yang menjadi dagangannya dengan frekuensi cukup, pedagang dengan mudah mau cerita apa saja yang selama ini menjadi permasalahan dan pedagang mempunyai banyak cerita tentang sesuai apa yang diminta peneliti.

Kesempatan ini merupakan waktu tepat dan tidak boleh disia-siakan oleh peneliti untuk meng *eksplor* data yang diperlukan dari mereka.

Bagi pedagang kaki lima yang sulit diajak berbicara dan diwawancarai Peneliti berupaya membela pedagang, membenarkan apa yang dilakoni

oleh mereka. Dengan berperan sebagai pembela dan pelindung akan Lebih mudah bagi peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Bila masih sulit mendapatkan data dari pedagang dengan cara tersebut peneliti mencoba dengan memberi sanjungan dan berbagai kata manis. yang membagikan hati pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota.

3.2.5. Pengolahan dan Analisis Data

Bogdan dan Miles (Moleong: 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian menghasilkan data deskripsi berupa-kata-kata tertulis lisan maupun dari orang yang diamati. Dalam penelitian kualitatif ini, analisa data dilakukan sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, setelah data didapat diolah secara sistematis.

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan Huberman dengan langkah-langkah :

1. Tahap pengumpulan data/*data collection* yaitu data yang diperoleh pada saat peneliti memasuki lingkungan penelitian.
2. Tahap reduksi data/ *Data Reduction* yaitu proses pemilihan data perhatian pada penyerderhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan tertulis di lapangan.
3. Tahap penyajian data / *Data display* yaitu penyajian data untuk kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/*Conclution* yaitu proses penarikan

kesimpulan dari data yang telah dianalisis oleh peneliti sebagai hasil dari wawancara.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman :

1. Data yang terkumpul dari berbagai sumber data melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dibaca, dipelajari ditelaah secara seksama, data yang terkumpul direduksi, sehingga terkumpul secara sistematis, tampak pokok-pokok terpenting yang menjadi fokus penelitian.
2. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam satuan-satuan berfungsi untuk menentukan atau mendefinisikan kategori dari satuan-satuan yang telah dikategorikan diberikan kode-kode untuk memudahkan pengendalian data, penggunaannya. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara memperpanjang keterlibatan dengan latar belakang penelitian dan melakukan pengamatan lebih teliti, rinci, dan mendalam. Melakukan triangulasi sumber data atau teori mendiskusikan sementara dengan teman sejawat.

3.2.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif tolok ukur keabsahan data ditentukan oleh sejumlah kriteria, dalam Moleong dan Guba (1995) ada 4 (empat) dasar temuan-temuan penelitian antara lain :

1. Kredibilitas.

Agar diperoleh temuan-temuan atau hasil yang dapat dijamin

tingkat kepercayaan, maka peneliti menempuh dengan berbagai cara yaitu : (a) Observasi, (b) Triangulasi, (metode, sumber, situasi), (c) Member check, dan (d) Diskusi dengan teman-teman sejawat, baik seminar maupun konsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Transferabilitas.

Mendeskripsikan secara rinci dan sistematis data yang diperoleh dari lapangan kedalam format yang telah disiapkan. Cara ini, agar dilakukan peneliti dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang data yang bermakna dalam penelitian.

3. Dependabilitas. (ketegantungan pada konteks nya)

Pemeriksaan kualitas penelitian, cara ini dilakukan untuk dengan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kualitas penelitian yang dikerjakan oleh peneliti mulai dari mengkonseptualisasi data menjangar data penelitian, hingga pelaporan hasil penelitian.

4. Konfirmabilitas (dapat tidaknya dikonfirmasi pada sumbernya)

Pemeriksaan hasil penelitian, cara ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat tingkat kesesuaian antara data yang telah terkumpul dengan fokus penelitian sebagai pendukung.

3.3 Jadwal dan waktu Penelitian

No.	Kegiatan/ Bulan	Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agus				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pendahuluan																																
2	Penyusunan proposal																																

BAB V HASIL YANG DICAPAI

A. Data Informan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian alun-alun kota Madiun, perihal model-model dari Perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemkot Madiun. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencari data baik, valid, efektif, dengan waktu pengambilan data sesuai kesepakatan. Wawancara dan observasi dilakukan siang, sore dan malam hari dengan berjalan santai, membeli makanan, minuman di alun-alun kota untuk pengambilan data penelitian dari pedagang di alun-alun Madiun. Sedangkan untuk subyek lain seperti satpol PP, DKP, disperindag dan LSM, RT/RW, Camat, lurah wawancara dilakukan ke masing-masing kantor dinas, kelurahan, kecamatan sesuai kesepakatan sebelumnya. Subyek dalam penelitian tentang model perlawanan pedagang Kaki lima di kawasan alun-alun Kota Madiun antara lain :

- a. Pedagang Kaki Lima (PKL).
- b. Ketua paguyuban.
- c. Pejabat pemerintah (Kadisperindag, Kasatpol PP, Kadis Dinas Kebersihan dan Pertamanan,)
- d. camat Manguharjo, Lurah, RT/RW
- e. Lembaga sosial masyarakatan, (LSM), BEM
- f. Orang pejalan kaki.

Berikut ini hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan subyek penelitian, yang dibantu oleh beberapa informan.

B. Hasil wawancara dengan pedagang kaki lima yang merupakan PKL definitif dan legal di kawasan alun-alun kota Madiun:

1. Saya Yitno, telah 12 tahun berjualan di alun-alun kota barang dagangan nya tahu petis, berjualan mulai jam 16 sampai jam 24 setiap hari. Sebagai PKL modal kecil Alasan saya cari hidup makan, sebab tidak ada kerjaan. Setiap saat konflik dengan satpol PP, petugas trantib agar mematuhi jadwal sesuai perda dari pemkot. Bila melanggar pedagang ditindak tidak boleh jualan. Model perlawanan PKL terbuka dan tertutup antara lain rasan-rasan, ngomel, demonstrasi, rusak tanaman, marah.
2. Saya Parmi, bakul pecel alasan jualan untuk hidupi anak tidak punya kerjaan, modal kecil, sudah 10 tahun jualan di alun-alun kota. Peraturan jualan yang ada sangat membatasi pedagang karena dari 3 shift menjadi shift, dari jam 12 00 sampai jam 24, terlalu pendek waktunya. Bila dapat jualan bisa dimulai jam 10 pagi sebab sudah banyak pembeli di areal alun-alun. Model perlawanan pedagang dengan tidak memilih jadi walikota lagi saja mas. Model perlawanan nya terbuka demonstrasi, lawan petugas, rusak tanaman , gelut sedang yang tertutup marah, ngomel, nggrundel, olok-olok
3. Andik, jualan bubur ayam jualan mulai jam 06.00 – 12 00 sudah jualan 11 tahun, anggouta paguyuban PKL, alasan menjadi pedagang kaki lima untuk hidupi anak-anak sebab tidak mempunyai pekerjaan habis di PHK. Lokasi tempat jualan pindah-pindah karena tidak mempunyai tempat tetap sehingga setiap saat konflik dengan satpol PP. Kebijakan pemkot membatasi jam jualan sangat merugikan pedagang karena jam jualan berkurang. Perlawanan pedagang dengan terbuka seperti demonstrasi, nekad jualan, merusak tanaman sedang yang tertutup antara lain, ngrundel, olok-olok adu mulut, ngomel, marah, keluarkan ancaman.
4. Pono, jualan es degan lokasi di alun-alun barat depan masjid Baitul Hakim, sudah jualan 13 tahun angguta paguyuban PKL, jualan mulai jam 12.00 – 24.00. Alasan menjadi pedagang kaki lima karena tidak punya kerjaan tetap, dan untuk hidupi anak-isteri. Waah peraturan baru pemkot memberatkan pedagang karena ada batasan jualan.

Adakah perlawanan pedagang terhadap kebijakan jualan Pedagang ? ada dengan melakukan perlawanan yang mode macam-macam seperti perlawanan terbuka dan tertutup. Perlawanan terbuka, contoh demonstrasi, lawan petugas, mencabuti tanaman, rusak pos satpol PP, ambil paksa lapak yang disita petugas sedang perlawanan tertutup misalnya ngomel, adu mulut, rasan-rasan, mengeluarkan ancaman ngrundel, mencacimaki satpol PP.

5. Djoko Pi, penjual Siomay masakan khas Bandung, sudah 10 tahun jualan di alun-alun utara mulai jam 12.00-24,00 Modal pas-pasan, pinjaman dari koperasi motivasi menjadi pedagang kaki lima karena tidak punya kerjaan tetap untuk kebutuhan hidup, sekolahkan anak. Saya anggauta PKL sudah lama dan berdomisili di jalan Pandan Pangongangan kota Madiun. Perlawanan pedagang karena kebijakan tsb merugikan pedagang, sebab waktu jualan berkurang. Perlawanan pedagang seperti demonstrasi, lawan petugas rusak tanaman, ambil paksa lapak yang ditahan petugas. (perlawan terbuka) dan adu mulut, ngomel, ngrundel, caci maki satpol PP, marah-marah dan mengeluarkan ancaman. sebagai perwujudan perlawanan tertutup.

6. P. Ran, penjual mie ayam dan bakso. sudah 12 tahun jualan di alun-alun kota bertempat di jln alon-alon timur alamat. Kejuron kecamatan Taman kota Madiun. Motivasi jualan karena terkena PHK di Surabaya dan untuk menghidupi keluarga. Kebijakan pemkot Madiun tentang pembatasan jam jualan sangat merugikan pedagang sebab waktu jualan menjadi berkurang berarti pendapat secara langsung turun. Perlawanan pedagang kaki lima, karena rizki berkurang. Model-model perlawanannya seperti secara terbuka dan tertutup. Seperti, adu mulut, olok-olok petugas, caci maki Ngrundel, mengancam, ngrasani petugas, marah-marah (perlawanan tertutup) Sedangkan perlawanan yang terbuka Seperti lawan petugas secara fisik, cabuti tanaman, ambil secara paksa barang yang disita satpol pp, dan demonstrasi.

7. Saya Pono, jualan Bajigur didepan masjid Baitul Hakim Sudah 10 tahun menjadi pedagang kaki lima untuk hidupi anak dan keluarga, karena tidak mempunyai kerjaan tetap. Saya menjadi PKL sudah mempunyai ijin dan angguota Paguyuban. Tiap hari membayar ristribusi, kebersihan, dan keamanan, dan mematuhi peraturan yang ditetapkan pemkot. Ada konflik dengan satpol PP, polisi setelah diberlakukan Aturan jam jualan sejak awal september. Saya tidak setuju

Karena membatasi jam jualan berarti hambat rizki masuk padahal persaingan antar pedagang semakin banyak. Saya melawan kebijakan tersebut dengan model perlawanan demonstrasi, rusak tanaman, mempertahankan lapak, ambil paksa lapak yang dirampas, (perlawanan terbuka) sedang yang tertutup dengan marah-marah, ngrundel, ngomel, adu mulut, mengancam petugas.

8. Bu Munah, rumah jl. Sarean Taman, saya protes pak dengan dibatasinya jam jualan karena dagangan tidak laku semua, mas Saya marah, ngomel, adu mulut, mengancam, olok-olok pada petugas bahkan bila perlu demonstrasi, adu jotos, mencabuti tanaman di alun-alun, mempertahankan lapak yang dirampas satpol PP. Ini semua untuk cari makan demi hidupi anak-anak karena tidak punya kerjaan tetap mas, padahal saya sudah 15 tahun jualan di alun-alun dan mempunyai ijin, sudah bayar ristribusi, kebersihan, dan keamanan tiap hari.
- 9 Tono, saya jualan ayam panggang ayam kampung pojok timur di alun-alun kota Madiun, rumah di jalan Kemiri sudah jualan 10 tahun, anggota paguyuban, memenuhi kewajiban pedagang Aku tidak setuju dibatasi jam jualan karena mengurangi rizki Sebab hanya menjadi pedagang kaki lima andalan ekonomi di keluarga. Kulo marah-marah, olok-olok satpol yang melarang Jualan, adu mulut, ngrundel, ngomel, ngrasani, pendapatannya berkurang drastis. Bahkan saya demonstrasi, adu fisik untuk mempertahankan lapak jualan, rusak tanaman yang ada di alun semoga ada penertiban pedagang baru karena banyak pedagan dari daerah lain masuk ke alun-alun tanpa mempunyai ijin.
10. Johan jualan CD lagu, lokasi alun-alun timur sudah 8 tahun bedagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena cari kerjaan sulit. Saya setiap hari bayar ristribusi, kebersihan dan keamanan dan telah menjadi anggota paguyuban pedagang . Saya menentang pembatasan jam jualan karena membuat PKL rizki berkurang, saya melawan dengan ngrasani, ngomel, adu mulut, ancaman, olok-olok pada petugas dan bila perlu adu fisik rusak tanaman, dan pertahankan lapak jualan bila akan diambil petugas satpol PP. Semua saya lakukan karena itu pekerjaan tetap sebagai mencari nafkah hidupi anak-isteri.

C. Hasil wawancara dengan ketua paguyuban Pedagang Kaki Lima

Dalam mencari data tentang model-model perlawanan PKL di Alun-alun kota Madiun, peneliti menemui organisasi yang tempat pedagang bernaung di Petro Alma untuk mendapatkan data yang valid, akurat, tentang kejadian sebenarnya yang dialami pedagang.

Paguyuban pedagang merupakan perwakilan para pedagang tempat mereka mencurahkan uneg-uneg/isi hati tentang permasalahannya dan tempat silaturahmi pedagang, termasuk konflik antar pedagang dengan satpol PP .

Berikut ini hasil wawancara mendalam, peneliti dengan ketua paguyuban tentang model-model perlawanan pedagang saat terjadi konflik pedagang dengan aparat satpol berkaitan diberlakukannya peraturan baru jam jualan di kawasan alun-alun kota. Peneliti menemui pimpinan paguyuban di rumah masing-masing pada saat hari luang :

1. Bagaimana model-model perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemkot tentang lokasi dan jam jualan pedagang ?

Darmo, ketua paguyuban PKL Petro Alma berpendapat Konflik antara pedagang kaki lima/PKL merupakan hal Yang tidak perlu bila anantara keduanya diajak ngomong Dalam menyusun aturan baru jam jualan, jangan aturan Baru lahir dilaksanakan harus dipatuhi, bila tidak tindak Ambil lapak. Diusir tidak boleh jualan.

Ngak bisa mas cara represif seperti itu, ini manusia yang mempunyai perasaan dan masalah perut, pasti pedagang mengadakan perlawanan. Mbok yoo o diajak rembukan. Perlawanan pedagang model-model tertutup seperti adu Mulut, ngomel, ngrasani, olok-olok, ancaman ke petugas. Sedang yang terbuka demonstrasi, konflik fisik, merusak tanaman, memperthankan lapak jualan dari penyitan oleh satpol PP.

2. Kapan perlawanan PKL dilaksanakan dan modelnya apa saja ?

Saya Parmin, wakil ketua paguyuban pedagang kaki lima Petro Alma konflik pedagang dengan satpol PP seharusnya tidak terjadi bila pemerintah kota Madiun sosialisasinya cukup dan semua elemen PKL diajak rembugan melalui perwakilan pedagang.

Model-model perlawanan pedagang ada yang terbuka seperti, demonstrasi, adu fisik, pertahankan lapak dan rusak tanaman di alun-alun kota, sedangkan model tertutup seperti mengancam petugas, ngrundel, ngomel ngrasani dan adu mulut dengan satpol PP.

3. Bagaimana dampak perlawanan pedagang terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun ?

Ponirah, penjual soto ayam yang merangkap menjadi

pengurus paguyuban Petro Alma berpendapat, bahwa perlu silaturahmi intensif pedagang dengan pemkot sebagai bagian dari pembinaan terhadap pedagang secara berkala. Paguyuban pedagang kaki lima mohon mengundang pemkot/disperindag dalam setiap acara arisan, temu sedulur. Agar terjalin komunikasi sehat. Sehingga tidak terjadi hubungan yang tidak baik seperti ngrasani, uneg-uneg yang tidak tersalurkan dan ngomel. ngrundel atas kebijakan. Apalagi timbul adu fisik, bentrokan langsung, sampai merusak tanaman. sebagai wujud perlawanan pedagang kaki lima.

D. Hasil wawancara model-model perlawanan pedagang kaki lima dengan pejabat pemerintah kota Madiun.

Pedagang kaki lima (PKL) di kota Madiun dibina dan kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pariwisata kota Madiun, bukan dinas Pasar kota Madiun. Namun dalam pembinaan dan penertibannya, pengaturan, dilibatkan satuan polisi PP, bagian perekonomian sebab pedagang kaki lima kegiatan berorientasi ke bidang ekonomi praktis.

Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan data yang valid, akurat, murni tentang bagaimana model-model perlawanan pedagang kaki lima, ketika menghadapi penertiban, penegakan Peraturan daerah tentang PKL. Dinas terkait dalam hal ini kadis mengetahui langsung apa yang terjadi? Dan bagaimana hal tersebut berlangsung? Di bawah ini pendapat pimpinan instansi terkait ?

1. Drs Totok Sugharto Msi, kepala dinas perdagangan perindustrian pedagang kaki lima adalah mitra pemkot dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan di kota Madiun. Pembinaan kita lakukan setiap saat melalui arisan, Kita mengundang pengajian bersama untuk membicarakan permasalahan pedagang dan harapan pemerintah kota dalam upaya kebersihan, ketertiban, kenyamanan kota. Peraturan tentang jam jualan PKL september 2012 dalam rangka menciptakan Kota bersih, sehat, teratur agar dapat adipura. Tidak ada maksud tertentu dari pemkot untuk melarang PKLwarga nya berjualan, mengkais rizki/nasi, dan bekerja sebagai Pedagang kaki lima di alun-alun kota, toh mereka warga kota. Bila terjadi beda pendapat itu adalah wajar, karena misi awal berbeda dalam menterjemahkan peraturan daerah. Perlawanan pasti ada baik terbuka maupun tertutup, seperti marah, ngrundel, adu mulut, ngomel, mengancam petugas, olok-olok, sedangkan yang terbuka demonstrasi, adu fisik, rusak faslitas dan tanaman di alun-alun, semua itu manusia karena keinginan tidak tercapai.

2. Bagaimana menurut bapak tentang penolakan pedagang terhadap kebijakan peraturan jam jualan di alun-alun kota?

Bambang Subanto Kasat Satpol PP, tugas saya sebagai satpol PP adalah mengamankan dan menegakkan perda di kota Madiun bila ada perlawanan dari pedagang semua wajar karena manusia ingin apa yang diinginkan semua tercapai itu bagian dari nafsu. Protes, demonstrasi, adu fisik, pertahankan lapak dan merusak tanaman adalah hal yang wajar manusiawi. Perintah pimpinan perundang-undangan dalam perda harus ditegakkan, dijalankan demi kepentingan bersama, khususnya untuk adipura.

3. Bagaimana hubungan antara piala adipura dengan penertiban Jualan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota?

Pak Suwarno kepala dinas pertamanan dan kebersihan, menurut beliau dengan jadwal jualan seperti kenarin di mana pedagang jualan penuh dalam 24 jam, hal tersebut membuat kasihan para tenaga kebersihan dan alun-alun menjadi kotor, tidak bersih dan sehat padahal lokasi alun-alun kota termasuk kawasan strategis untuk rekreasi keluarga, pusat hiburan di Madiun Square, pusat kegiatan kenegaraan untuk upacara panitia hari besar nasional. Tidak salah bila ada jadwal jeda untuk PKL dari jam 06.00-12. sehingga pekerja kebersihan dapat bersihkan alun-alun kota. pedagang kaki lima marah-marah, ngomel, ngrundel, olok-olok mengancam, caci maki petugas satpol PP wajar, bahkan protes demonstrasi, adu fisik, rusak fasilitas dan tanaman di alun-alun wajar karena keinginan tidak terpenuhi.

D. Hasil wawancara dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

1. Apakah terjadi perlawanan pedagang kaki lima di alun-alun kota terhadap kebijakan pemkot Madiun ?

Yaa mas, ada perlawanan dari PKL terhadap kebijakan pemkot pengurangan jam jualan di kawasan alun-alun kota, karena dengan jam jualan dikurangi mulai jam 00.00-12.00 wib yang membuat pendapatan pedagang berkurang. Inilah faktor-faktor utama perlawanan mereka mas, sebab jam 10.00 sudah banyak orang yang duduk-duduk santai di alun-alun setelah jemput anak sekolah.

Perlawanan pedagang kaki lima (PKL) modelnya bermacam-macam seperti marah-marah, ngomel, ngrundel, caci maki, membandel mengancam, ngrasani, adu mulut, olok-olok bahkan ada yang adu fisik, cabuti tanaman, pertahankan lapak,

protes dan protes demonstrasi ke pemkot.(andik kurniawan BEM -Unmer)

2. Bagaimana BEM menanggapi kebijakan pemkot tersebut?

Sebenarnya maksud, tujuannya baik, untuk ciptakan kawasan alun-alun sehat, bersih, indah, nyaman dengan lokasi tersebut. Patut disesalkan proses terbentuknya aturan tersebut kurang melibatkan unsur pedagang dan sosialisasi kurang. Andaikata mereka dilibatkan khususnya melalui paguyuban yang ada mungkin tidak terjadi perlawanan. Model-model perlawanan seperti grundel, ngomel, adu mulut, mengancam, olok-olok, marah-marah, ngrasani, bahkan mereka demonstrasi ke pemkot, cabuti tanaman, adu fisik, mengambil paksa lapak dagangan di kantor satpol PP.(Amin BEM Poltek)

3. Faktor apa penyebab pedagang kaki lima melawan kebijakan pemkot?

Saya dari LSM, sangat tidak setuju kebijakan pemkot tentang pengurangan jam jualan PKL, hal tersebut mengurangi rizki pedagang, sebab hidup mereka hanya dari jualan sumbernya. Proses penciptaan perda dan sosialisasinya tidak melibatkan pedagang maupun perwakilan paguyuban sehingga menimbulkan reaksi perlawanan. Perlawanan tertutup dan terbuka sebagai cara mengungkapkan aspirasi terjadi di alun-alun Madiun. Pedagang kaki lima yang saya temui reaksinya bervariasi ada marah-marah, ngrundel, ngomel, ngrasani, sakit hati, ancaman bahkan terjadi demonstrasi, protes rusak tanaman, adu fisik. Seharusnya sejak awal pedagang dilibatkan dalam pembuatan peraturan, sosialisasi melalui wakil pedagang dalam paguyuban Petro Alma. Seharusnya ada pembatasan jumlah pedagang yang jualan di alun-alun, hendaknya mereka harus warga kota yang dibuktikan dengan KTP. Selama ini pedagang kaki lima (PKL) banyak yang dari luar kota Madiun seperti Kab.Madiun, ngawi Magetan, Ponorogo.(rudi.LSM Putra Bangsa).

E. Pejalan Kaki.

Salah satu subyek penelitian, yang cukup penting, netral Pejalan kaki yang lewat di sekitar alun-alun kota Madiun pada waktu terjadi perlawanan pedagang kaki lima terhadap satpol PP dalam rangka menegakkan peraturan daerah tentang penataan waktu jualan pedagang. Mereka adalah pak Zainal, Bambang dimana pada waktu pelaksanaan penegakan peraturan hari ke 1 lewat di jalan alun-alun utara, alun-alun timur dan P. Sudirman.

1. Apa yang pak Ari ketahui tentang menertiban jam jualan PKL di alun-alun kota ?

” waah ora ngerti mas, opo sing terjadi tahu-tahu polisi Satpol PP akeh, polisi juga banyak bakul ono pinggir Jalan. Sebenarnya diajak ngomong yang baik-baik Sebelumnya . pedagang itu orang kecil hanya butuh Makan, butuh hidup tidak neko-neko. Mungkin cara sosialisasinya yang kurang intensif, waktunya tidak tepat, maka pemkot harus persuasif dengan PKL.”

2. Bagaimana model-model perlawanan pedagang .?

” Model-model nya macam-macam pak, ada ngomel Ngrundel, caci maki, olok-olok, marah, ngrsani satpol PP dari pinggir jalan dan mengancam petugas karena Marah. Bahkan pada hari pertama pedagang demonst Adu fisik pertahankan lapak jualan, merusak fasilitas Yang ada dialun-alun seperti cabuti tanaman.?

3. Bagaimana dampak adanya perlawanan pedagang kaki lima?

” Perlawanan pedagang kaki lima pada satpol PP di Alun-alun membuat hubungan kurang harmonis antara pedagang dengan satpol PP, dan pendapatan pedagang berkurang, karena waktu jualan sebelumnya lama 3 shift menjadi 2 shift. Perlunya mediasi konflik antara pedagang dengan pemkot untuk cari mencari solusi.”

Berikut ini wawancara peneliti dengan pejalan kaki, Bambang Murtijoso.

” Sebenarnya andaikata PKL dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan jam jualan melalui perwakilan pedagang, tidak terjadi perlawanan pedagang pada satpol PP. Perlu adanya komunikasi intensif anatara paguyuban pedagang dengan pemkot lewat Disperindag. Sosialisasi peraturan harusnya lebih lama waktunya karena mengatur hidup, nafkah.”

Bagaimana model-model perlawanan pedagang kaki lima pak .?

” model-model perlawanan jelas ada, seperti marah marah, ngomel, ngrundel, ngrasani, mengancam caci maki, olok-olok. Bahkan ada demonstrasi, adu fisik, merusak tanaman, mrampas lapak-lapak jualan Hal tersebut merupakan ekspresi kekecewaan PKL Terhadap kebijakan pemkot Madiun.”

Apakah dampak dengan adanya perlawanan pedagang ?

” Suasana menjadi tegang, tidak kondusif karena PKL dengan satpol PP konflik, pembeli menjadi takut membeli makanan akibatnya jualan tidak terjual/rugi. Dampak pendapatan pedagang berkurang dan suasana Alun-alun tidak kondusif kedua belah pihak saling berselisih.”

D.Diskusi Teoritik

Dari uraian yang telah peneliti ungkapkan, peneliti dapat paparkan bahwa perlawanan pedagang kaki lima merupakan reaksi atas tindakan represif satpol PP dan diterapkannya peraturan pengurangan jam jualan pedagang di alun-alun. Konflik pedagang kaki lima dengan satpol PP merupakan perbedaan cara pandang tentang arti penerapan perda dalam menterjemahkan maksud dan tujuan isi. Pemerintah Madiun ingin menertibkan, menjaga kebersihan, keindahan, suasana sehat di alun-alun kota. Sedangkan pedagang inginkan jualan pedagang waktunya tidak dikurangi, agar pendapatan tidak berkurang.

Perlawanan pedagang kaki lima/PKL terhadap kebijakan merupakan konflik penguasa dengan orang yang dikuasai dalam perspektif teori dialektika Ralph Dahrendorf. Menurut teori ini masyarakat dianggap seperti sekeping uang dimana konflik dan konsensus seperti sekeping mata sangat dekat. Perlawanan pedagang kaki lima terhadap/PKL terhadap pemkot Madiun mudah diselesaikan selama masing masing pihak tidak egois pada kepentingannya. Konflik terjadi karena masing-masing pihak egois, terhadap kepentingan yang diinginkan, tidak bersedia mengendorkan tuntutan-tuntutan, pokok nya harus dapat kabulkan. Akhirnya yang terjadi perselisihan yang berdampak pada stabilitas.

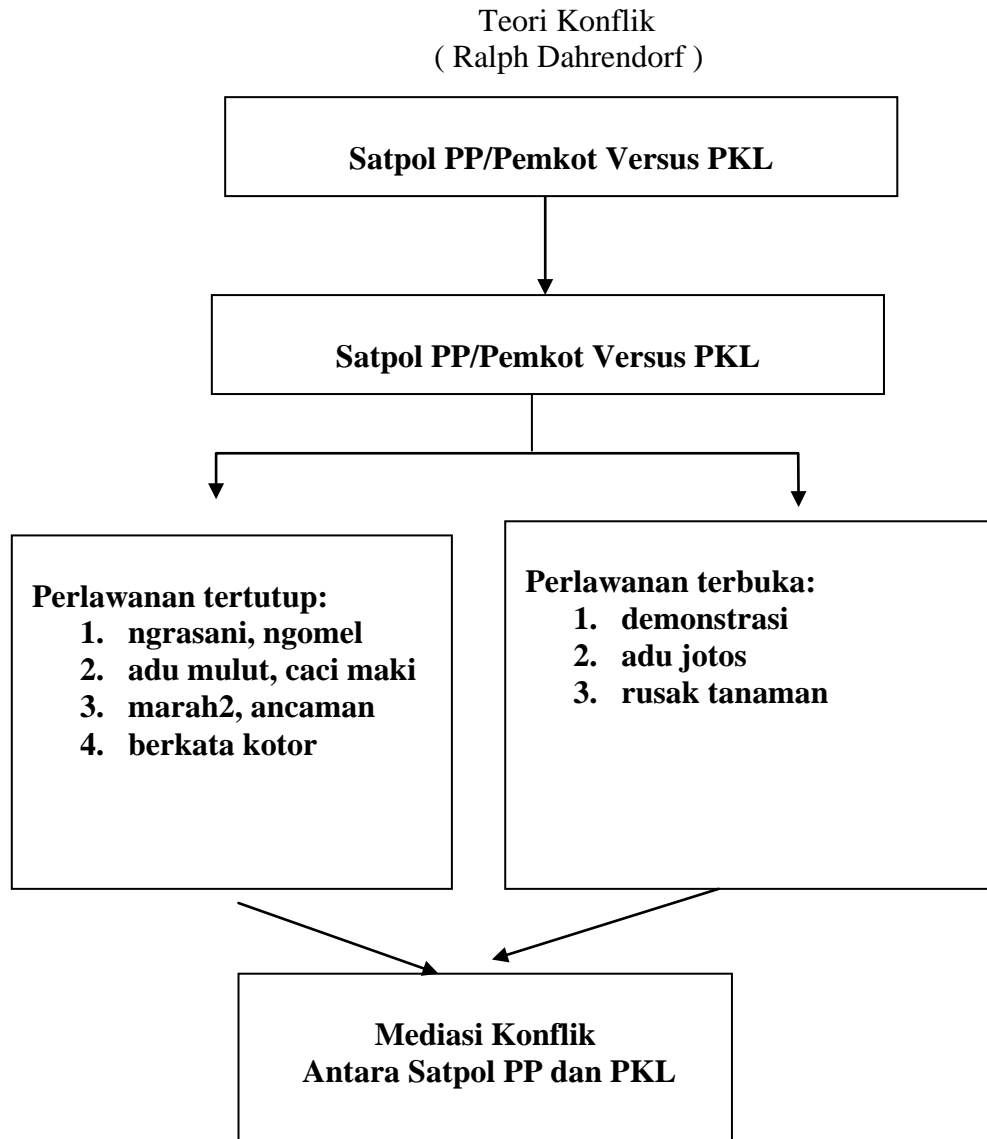
Menurut J.Scott, model-model perlawanan ada 2 (dua) yaitu perlawanan tertutup dan perlawanan terbuka. J. Scott berpendapat bahwa perlawanan tertutup perlawanan yang dilakukan secara non fisik/phsychis, seperti ngrasani, misuh ngomel, ngrundel, olok-olok, marah - marah, mengancam, adu mulut, caci maki. Sedangkan perlawanan terbuka adalah perlawanan yang dilakukan dengan kekuatan fisik seperti adu fisik, demonstrasi, pertahankan lapak, gontok-gontokan. Hasil wawancara dan observasi subyek menunjukkan bahwa model-model perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima/PKL dalam konfliknya dengan satpol PP bentuknya 2 (dua) model perlawanan tertutup dan perlawanan terbuka .

ada kesesuaian antara teori yang digunakan dalam penelitian dengan data yang terjadi di lapangan pada waktu perlawanan. Konflik terjadi karena adanya perbedaan diantara dua pihak dalam mengartikan suatu masalah sehingga menimbulkan perbedaan yang berakibat terjadi perlawanan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari subyek penelitian membuktikan bahwa jawaban yang ada diperoleh tentang faktor-faktor penyebab konflik sesuai dengan teori Raplh Dahrendorf tentang konflik. Bahwa konflik PKL dengan pemerintah kota /satpol PP merupakan konflik antara penguasa /pemkot dengan pedagang kaki lima/PKL (orang yang dikuasai). Sedangkan model-model yang digunakan dalam aksi pedagang merupakan perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup sesuai pendapatnya James Scott.

Perlawanan tertutup adalah perlawanan dengan dicirikan tidak serius, tidak terencana, individual, non fisik, isidental, pura-pura seperti ngomel, marah-marah, ngrundel, caci maki, rasan-rasa dan sakit hati. Sedangkan perlawanan terbuka dicirikan serius, sungguh-sungguh, terencana, kolektif, berdampak luas di masyarakat seperti adu mulut, adu fisik, merusak tanaman, dan demonstrasi. Selaras dengan hasil penelitian maka antara teori dengan hasil dalam penelitian sesuai dan cocok dengan jawaban subyek penelitian, baik pedagang kaki lima, pejabat pemkot, dan LSM, BEM, tokoh masyarakat.

D. Bagan Model-model Perlawanan Pedagang Kaki Lima/PKL



BAB VI

KASIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi \ Informal yang berkembang pesat di kota Madiun dengan, dengan modal relatif kecil, sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan tetap atau terkena PHK.
2. Pemkot Madiun, bermaksud menjalankan peraturan tentang penataan jam jualan untuk menjaga kebersihan, ketertiban keindahan, sehat di sekitat alun-alun kota Madiun. Mengingat kawasan tersebut merupakan tempat hiburan dan rekreasi keluarga dan terletak di pusat pemerintahan kotakabupaten Madiun. Dan memberi kesempatan pasukan kuning bersihkan alun-alun kota, maka harus diatur jam jualan PKL.
3. Dalam penelitian, digunakan metode kualitatif dengan metode Pengambilan data dengan observasi dan wawancara mendala Nalisa data menggunakan teori Huberman and Miles. Kajian teori menggunakan teori konflik makro Ralp Dahrendorf dan teori perlawanan James Scott.
4. Hasil penelitian model perlawanan pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan pemkot Madiun, bahwa ada konflik di alun-alun kota Madiun antara PKL dengan satpol PP Kota dalam pengaturan waktu jualan pedagang yang semula 3 shift durasi 18 jam menjadi 2 shift durasi waktu 12 jam. Dengan adanya peraturan tersebut pedagang melakukan perlawanan dengan model-model perlawanan tertutup dan perlawananan terbuka.
5. Perlawanan tertutup adalah perlawanan dengan non fisik, seperti ngrundel, ngomel, caci maki, olok-olok, ngrasani, dan marah-marah, perlawanan sembunyi-sembunyi. Sedangkan perlawanan terbuka adalah perlawanan sungguh-sungguh atau terang-terang an, dengan menggunakan fisik seperti adu fisik merusak tanaman, demonstrasi, berkelahi. (James Scott:1993).

B. Saran-saran

1. Pedagang kaki lima merupakan bagian sektor informal yang sangat potensial dalam rangka membangun ekonomi rakyat. Sektor informal sangat berjasa dalam membantu hidup rakyat Untuk mecukupi kebutuhan sehari anak, keluarga. Karena Itulah hendaknya pemkot kota Madiun membantu eksistensi Pedagang kaki lima untuk hidup dan berkembang, jangan sebaliknya menghilangkan PKL.
2. Pedagang kaki lima perlu dibina, diberdayakan, dibantu dalam menjalankan kegiatan, karena dengan berkembangnya PKL pemkot telah membantu rakyat mandiri dalam sektor ekonomi mengurangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran di kota .

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombi, Nicholas et al.2010. Kamus sosiologi terjemahan Desi Noviyanti, Eka Adinugraha dan Rh Widada Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Alisyahbana. 2006 Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan Surabaya : ITS Press.
- Amin, ATM Nurul, 2005 "The Informal Sector Role In Urban Environ Mental Management" inInternational Review For environmental Strategis vol 5, No 2,pp 551-530.
- Anderson, James E.2000 PUBLIC Policymaking Forurth Edition. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Anonim, 2010 "Penggusuran Lapak PKL di Semarang di Warnai Bentrok" dalam [http://www.metro-tvnews.com/index.php/metromain/news/2010/06/23/21305/Penggusuran Lapak PKL-di-Semarang—diwarnai Bentrok](http://www.metro-tvnews.com/index.php/metromain/news/2010/06/23/21305/Penggusuran_Lapak_PKL-di-Semarang—diwarnai_Bentrok). Diunduh Senin 5 Juli 2010.
- Anonim. 2012 "Wirasandi Alias Pam SwakarsaKaum Kompeni " dalam forum No.34/26 Desember 2011-01 Januari 2012. Hlaman 12-15.
- Anoraga Panji, 2001 Psikologi Kerja. Rineka Cipta.
- Ari , Bambang, 2008 Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung dengan perspektif Kebijakan Publik Dalam jurnal Pendidikan Profesionalvolum IV No,19 November 2008.
- Azuma, Yoshiaki and Herschel I, Grossman. 2008.Theory of The Informal Sektor In Economics and Politics Volume 20 March 2008 No I pp.62-79.

- Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Surakarta. 2007 Memboyong PKL 989 PKL dari Banjarsari ke Semanggi Solo Pemerintah Kota Surakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010 Data Strategis .BPS. Jakarta : BPS.
- Baerhr, Peter, dkk (ed) 2001. Instrumen Internasional Pokok Ha-hak Azasi Manusia.
- Bappeda dan BPS, 2010 Kota Semarang dalam Angka 2009 Semarang
- Basri Faisal dan Haris Munandar, 2009 Lanskap Ekonomi Indonesia Kajian Renungan terhadap masalah-masalahStruktur Transformasi Baru dan Prospek Perekonomia Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group.
- Bhowmik, Sharit K "Street Vendor in Asia : a Riview " in Economic And Political Weekly May 28 June 4, 2005 pp.2264.
- Bowen, Glenn A.2009. " Social capital, Social Funds and Poor Communities : An Exploratory Analisis ". In Social Policy and adminstration Volume 43 , No 3, June 2009.
- Bromley, Ray, 1991 Orgtanisasi , Peraturan, dan Pengusahaan Sektor Informal di Kota:Pedagang Kaki Lim Di Cali Colombia " dalam C manning dan T. Noer Effendi (ed) Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal di Kota. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Bromly, Ray.2000 " Street Vending and Public Policy : a Global Review ". IN the International journal of Sociology and Social Policy Volume 20 num Number ½ 2000pp.1-28.
- Budiman, Bambang, 2010 Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawsan Banjaran Kab.Tegal. Semarang tidak diterbitkan.
- Cahyono kahar S,2010. Buruh, Bergerak ! Pengalaman Aliansi Serik Buruh Serang, Jakrta ; TURC.

- Chaplin, JP. 2005. Kamus Lengkap Psycologi, Terjemahan Dr.Kartini Kartono. Jkarta ; PT Raja Grafindo Persada.
- Chen Marta, et al, 2005 Progress of The Worlds Womens 2005 Women Work and Poverty. ; Unifem.
- Christakis, Nicholas A. Dan James H. Flower, 2010. Connected Dahsyatnya Kekauatan Jejaring Sosial Mengubah Hidup : Kita. Terjemahan Zia Anshor, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Coleman, James S, 2000 "Social Cpital in The Creation of Human Capital". In Partha Dasgupta and Ismail Seregeldin. Social Capital A Multifaceted Pespective. Washingon DC.:The World Bank
- Coleman. James 2009. Dasar-dasar Teori Sosial, terjemahan Imam Muttaqien , dkk. Bandung : Nusa Media.
- Dinas Pasar Semarang.2008. Buku Saku Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang.
- Dunn Wiliam, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi terjemahan Samo.
- Dra Wibawa, dkk Yogyakarta ; Gajah Mada University Pres
- Effendy, 1977 Sektor Informal dan Wawasan Pengembangan masyarakat.
- Makalah Diskusi Orientasi Pendalaman Tugas Anggouta DPR
- Field, John, 2010 Modal Sosial. Terjemahan Nurhadi, Bantul ; Kreasi Wacana
- Field, John, 2008. Social Capital Second Edition. New York ; Routladge.
- Firdausy, Carunia M (ed).1995. Pengembangan Sektor Informal Prdagang Kaki Di perkotaan . Jakarta DRN dan Bapenas.
- FT. Undip dan Bapeda Semarang, 2007." Kebijakan Publik bagi PKL di Lokasi Strategis di Kota Semarang".dalam Riptek Nomer 1 November 2007 hal. 35-38.

- Fukuyama, Franciss, 2005. *Goncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosialbaru*. Terjemahan Masri Maris, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Habermas, Juergen, 2004. *Krisis Legitimasi*, terjemahan Yudi Santoso. Yogja Jakarta, Kalam.
- Habermas, Juergen, 2009 *Teori Tindakan Komunikatif Buku Satu Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. terjemahan Nurhadi, Bantul: Kreasi Wacana.
- Hamidjoyo, Kunto. 2004. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Inplementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan PKL di Surakarta. (Studi Kasus di Kec. Laweyan)* Tesis Magester Ilmu Administrasi PPS Undip Semarang.
- Handoyo Eko.2010 *Eko Prasetyo dan Siti Maesaroh, 2009. Peran Penguatan Modal Sosial Melalui Usaha Ekonomi Kerakyatan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pasca Gempa Bumi di Yogyakarta. Laporan Penelitian Dasar P2M DIKTI . tidak diterbitkan.*
- Handoyo, Eko 2011. *Modal Sosial dan Kontribusi Ekonomi Pedagang Sayur Keliling di Semarang. Laporan Penelitian FIS Unnes tahun 2011, tidak diterbitkan.*
- Hariyono, Paulus. 2007 *Sosiologi Kota untuk Arsitek, Jakarta : PT Bumi Aksara.*
- Hidayati, Tuti. 2007. *Pekerja sektor informal dan Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah, volume 3 Nomor 1, Agustus2007 , halaman 18-28.*
- ILO, 1998. *Emploment Challenges of the Indonesian Economic Crisis, Jakarta ; Internasional Labour Organisation And United Nations Development Programme.*
- Irwanto, 2006. *Focused Group Discussion. Jakarta Obor Indonesia.*

- Kadir ,Ishak. 2010 Studi Karakteristik Penggunaan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan eks pasar Lawalata Studi Kasus jalan taman surapati Kota Kendari”. Dalam Metropilar Volume 8 1 Januari 2010. Hal 108-116.
- Kinloc, Graham C, 2005. Perkembangan dan Pradigma Utama Teori Sosiologi Di edit oleh Dadang Kahmad, Bandung ; CV. Pusat Setia.
- Lawang, Robert MZ, 2005. Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta ; FISIP UI Press.
- Manning, Cris and Kurnya Roesad. 2006. ' Survey of recent Development” in Bulletin of Indonesia Economic. Studies 42 920, pp 143-170.
- Maryuni, Sri. 2007. ”Alternatif Kebijakan terhadap Sektor Informal di Kota Pontianak”. Dalam spirit publik Volume 3, Nomer 2, Oktober 2007, halaman 141-148.
- Mulyaningsih, Yani, dkk 2009, Pendahuluan dalam Zarmawi Ismail (ed) Pengembangan Kewirausahaan Sektor Informal : Studi Kasus Pedagang Kaki Lima. Jakarta: LIPI Pres
- Nirathorn, Narumel, 2006 Fighting Powerty Poverty from the Sreet ; a Survey of street Vendors in Bangkok, Bangkok Internasional.
- Noer Effendi, Tadjuddin, 2005 ”Pengangguran Terbuka dan Setengah Penganggur Di Indonesia” Mengapa tidak meledak saat Krisis ekonomi”.Universitas Gadjah Mada 5 Maret 2005 di Yogyakarta,
- Permadi, Gilang 2007. Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dahulu, nasibmu Kini. Nasibmu kini Jakarta ; Yudistira.
- Petras, James.2005 Gerakan buruh Pengangguran Kota Argentina (GPP) Dalam Coen Husain Pontoh (ed) Yogyakarta Resis Book.

- Priono, Agus, 2004. Kajian Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota terhadap Rencana Pemindahan ke Taman di Tuk Buntung Kota Cepu.Semarang Undip
- Rachbini, Didik J, 2006. Ekonomi in Formal di tengah kegagalan Negara. <http://www.kompas.co.id/kompascetak/0604/15fokus/2584996.htm> diunduh 14 Desember 2010.
- Ramli, Rusli, 1992 Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta : Ind-Hill-co.
- Rachbini, Didik J, Abdul Hamid 1994. Ekonomi In formalPerkotaan. Jakarta LP3ES.
- Rasyid, Ryas, 2002. Makan Pemerintah. Jakarta : PT, Mutiara Sumber Widya.
- Ritzer, George, 2012 Paradigma Sosiologi
- Ritzer, George ang Goodman D 2004 Teori Sosiologi dari Teori Klasik sampai Teori Sosial Post Modern. Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Samhadi, Sri Hartati, 2006 Dilema Sektor Informal, dalam harian Kompas Edisi Fokus, Sabtu 15 April 2006.
- Salmi, Jamil 2003. Kekerasan dan Kapitalisme Pendekatan Baru dala Melihat HAM. Terjemahan agus Prihantoro. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sethurahman, SV, 1976. "The Urban Informal sector ; Concepe Measurment And Policy. In International Labour Review Vol 114 No 1 July-Agustus 1976.
- Siswono, Eko, 2009. Resistensi dan Akomodasi :Suatu Kajian tentang Hubungan-hubungan Kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) Preman, Aparat di Depok Jabar.
- Disertasi PPSDep.Anthropologi FISIP-UI Jakarta Tidak diterbitkan.

- Soeroso, 1978 Mencari Definisi Informal Sector. Bandung PPES FE Unpad.
- Setiawan ZS, Isbedy, 2008 Pasar tanpa PKL tidak asyik. Dalam [http://isbedysetiawanblogspot.com.2008/pasar tanpa pkl-tak Asyik. Html](http://isbedysetiawanblogspot.com.2008/pasar_tanpa_pkl-tak_Asyik.Html).
- Sugiyono. 2006 Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif Dan R dan D. Bandung ; Alfabet.
- Suharto, Edi 2002 "Human Development and The Urbans Informal Sector in Bandung Indonesia ; The Poverty issue'. in New Zealand Journal of Asia Studies 4,2 Desember 2002 pp. 115-133.
- Suharto, Edi, 2008 Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan publik, Bandung Alfabet.
- Sukmana, Oman Sosiologi Politik dan Ekonomi, Malang. UMM.
- Surbakti, Ramlan 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta PT. Gramedia Widayarsana.
- Titov, Vladimir 2006 "Informal Economi as a system Social Mechanism Of Operation and Reproduction".in Social Science 2006. 37,2 ProQuest Sociology, pp 3-14.
- Wawasan, 2010 "Pedagang Kaki Lima dalam Koran Wawasan Sabtu Wage 23 Oktober 2010 halaman 13.
- Wibowo I, 2010 Negara Centeng, Negara dan Saudagar di Era Globalisasi, Yogyakarta, Kanisius.
- Wilson, 2005 'MST dan Gerakan Petani, tanpa tanah di Brazil Dalam Coen Husain Pontoh (ed) Yogyakarta Resits Book.
- Wijayaningsih, Retno, 2002 Keterkaitan PKL terhadap kualitas dan Citra Ruang Publik di koridor Kartini Semarang pada masa Pra Pembongkaran (Studi kasus PENGALAN dr Cipto Jl Barito.

- Winarno, Budi, 2007. Kebijakan publik Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Presindo.
- Wolford, Wendi 2005 "Memproduksi Komunitas MRT dan pemukiman Pemukiman Land Reform di Brazil ' dalam Noer Fauzi (ed) Gerakan-gerakan rakyat Dunia ketiga. Yogyakarta: Resist Book.
- Yusuff, Olabisi Sherifat 2011, "A Theoretical Analisis of the Concept of Informal Economy and Informality in Developing Countries" In European Journal of Social Sciences Volume 20, Number 4 (2011) pp.624-636.
- Zen, Patra M, dan Restu Mahyuni (ed) 2007, Legal Empowerment of The Poor : Lessons Learned from Indonesia. Jakarta and New York : YLBHI, UNDP and CLE.

LAMPIRAN